

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud disusunnya laporan keuangan adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah selama periode tertentu, yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah sebagai Entitas Pelaporan. Pemerintah Kota Ternate sebagai Entitas Pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan dan hasil yang telah dicapai dalam periode tertentu, sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas manajemen dan keseimbangan kecukupan penerimaan guna dapat membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan. Sedangkan tujuannya adalah untuk menyajikan informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai perwujudan dalam menilai akuntabilitas, transparansi dan untuk membuat keputusan baik dibidang ekonomi, sosial maupun politik bagi Pemerintah Daerah Kota Ternate.

Dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan diubah untuk kali kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 maka penyusunan Laporan Keuangan Daerah terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode tertentu.

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

3. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non keuangan.

4. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, menyajikan informasi pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Dalam CaLK juga diuraikan realisasi pencapaian target kinerja keuangan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun anggaran berjalan dan kebijakan akuntansi yang meliputi penjelasan yang berkaitan dengan realisasi pencapaian target pendapatan, penjelasan pos belanja dan pembiayaan, Aset, Kewajiban, Ekuitas Dana, Arus Kas dan Posisi Dana Cadangan Daerah.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Ternate. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 32);
22. Peraturan Walikota Ternate Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Ternate Tahun 2011 – 2015.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Pemerintah Kota Ternate Tahun Anggaran 2011 dibagi ke dalam enam bab, terdiri dari:

BABI : Berisi Pendahuluan yang membahas secara khusus maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

- BAB II : Diuraikan mengenai kondisi ekonomi makro, kebijakan keuangan dan indikator pencapaian target kinerja APBD
- BAB III : Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.
- BAB IV : Membahas mengenai entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- BAB V : Berisi rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan yang terdiri dari pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan komponen-komponen laporan arus kas, disamping itu memuat pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual.
- BAB VI : Berisi Penutup yang diuraikan mengenai kesimpulan secara garis besar dari Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2011.

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ternate Tahun Anggaran 2011 telah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi makro Kota Ternate Tahun 2011. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan pada beberapa indikator ekonomi makro Kota Ternate yang akan dijabarkan dibawah ini.

2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Kota Ternate selama tahun 2011 diprediksikan mencapai mencapai 8.03%, lebih tinggi dibanding tahun 2010 yaitu sebesar 7,99%. Walaupun peningkatan yang dicapai kecil, tetapi ini menunjukkan adanya kemampuan pertumbuhan yang lebih baik dari tahun sebelumnya.

Posisi Kota Ternate sebagai Kota kepulauan dengan 7 Kecamatan, sejak dahulu dikenal sebagai Kota Perdagangan dan saat ini sebagai pintu gerbang Provinsi Maluku Utara. Kota Ternate memiliki nilai lebih dari sudut pandang ekonomi dibanding daerah lain di Provinsi Maluku Utara. Hal ini dikarenakan peranan beberapa sektor ekonomi yang merupakan sektor-sektor yang bercirikan perkotaan seperti sektor perdagangan, sektor jasa dan sektor transportasi dan komunikasi di Kota Ternate lebih dominan dibanding Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Maluku Utara. Sektor-sektor ekonomi ini memberikan kontribusi lebih dari 40% bagi nilai PDRB Kota Ternate selama lima tahun terakhir.

Dengan berkembangnya perekonomian Kota Ternate tentunya akan berdampak pada peningkatan PDRB. Namun angka tersebut belum dapat menggambarkan penerimaan penduduk secara nyata dan merata karena masih dipengaruhi oleh kepemilikan faktor produksi serta kesenjangan pendapatan. Walaupun demikian angka tersebut dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk melihat rata-rata tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah.

Nilai PDRB Kota Ternate atas dasar harga berlaku pada tahun 2011 mencapai Rp1.143,514 milyar atau lebih tinggi dibanding tahun 2010 yaitu sebesar Rp989,655 milyar. Dengan adanya peningkatan tersebut mengindikasikan telah terjadi peningkatan produktivitas pada sektor-sektor ekonomi yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat. Pendapatan perkapita Kota Ternate pada tahun 2010 sebesar Rp2.777.467 meningkat menjadi Rp2.955.276 pada tahun 2011.

2.1.2. Inflasi

Indikator lain yang sangat penting dalam menentukan kondisi dan stabilitas perekonomian daerah adalah inflasi. Inflasi selain berkaitan dengan interaksi antara penawaran dan permintaan, juga tidak lepas dari faktor-faktor lainnya seperti tata-niaga dan kelancaran distribusi barang dan jasa, serta peran kebijakan pemerintah di bidang moneter. Inflasi dalam arti sempit adalah peningkatan harga barang dan jasa kebutuhan dasar masyarakat secara rata-rata.

Inflasi Kota Ternate pada tahun 2011 adalah sebesar 4,52%, lebih tinggi bila dibandingkan dengan inflasi nasional sebesar 0,57%. Semua kelompok komoditas mengalami inflasi terutama kelompok bahan makanan yang memberikan sumbangan terbesar dalam terjadinya inflasi di Kota Ternate.

Besaran inflasi Kota Ternate dalam beberapa tahun terakhir hampir selalu berada dibawah nasional.

2.1.3. Ketenagakerjaan

Dalam hal ketenagakerjaan disamping angkatan kerja dan struktur ketenagakerjaan, permasalahan penting lainnya adalah pengangguran. Pengangguran dari sisi ekonomi dapat diartikan sebagai ketidakmampuan pasar kerja dalam menyerap angkatan kerja yang tersedia. Ketersediaan lapangan kerja yang relatif terbatas tidak mampu menyerap para pencari kerja yang senantiasa bertambah setiap tahun seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Walaupun relatif kecil Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Ternate tahun 2011 yang tercatat sebesar 8,66% (Hasil Sakernas Agustus 2011), angka ini mengalami penurunan atau lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2010 yang tercatat sebesar 10,31%.

2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia

Secara konseptual Indeks Pembangunan Manusia adalah indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari Indeks Harapan Hidup, Indeks Pendidikan (melek huruf dan rata-rata lama sekolah) dan Indeks Standar Hidup Layak. IPM merupakan alat ukur kinerja pembangunan yang dilakukan di suatu wilayah negara, provinsi maupun kabupaten/kota. IPM bisa digunakan sebagai salah satu petunjuk untuk melihat apakah arah pembangunan yang dilakukan sesuai dengan yang ditetapkan. IPM dan komponen-komponen penyusun IPM dapat dimanfaatkan sebagai penilaian lintas sektoral terhadap hasil-hasil pembangunan daerah.

IPM sebagai indikator pencapaian pembangunan manusia di Kota Ternate menunjukkan nilai yang terus meningkat selama dua tahun terakhir. Pada tahun 2009 nilai IPM Kota Ternate tercatat 76,13 % dan peningkatan pertama di Provinsi Maluku Utara. Pada tahun 2010 nilai IPM Kota Ternate meningkat menjadi 76,58 % dan masih merupakan peringkat pertama di Provinsi Maluku Utara. Sedangkan untuk Tahun 2011 IPM Kota Ternate diprediksikan meningkat sebesar 76,93 %

2.2 Kebijakan Keuangan

Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ternate Tahun Anggaran 2011 dilaksanakan dengan berpedoman pada, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 yang ditetapkan sebagai Petunjuk Pelaksanaan.

Untuk Tahun 2011 Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ternate Mencakup 40 Satuan Kerta Perangkat Daerah (SKPD) yaitu :

No.Urut	Kode SKPD	Nama SKPD
1.	10101	Dinas Pendidikan Nasional
2.	10103	Sanggar Kegiatan Belajar
3.	10201	Dinas Kesehatan
4.	10301	Dinas Pekerjaan Umum
5.	10404	Kantor Pemadam Kebakaran
6.	10502	Dinas Tata Kota dan Pertamanan
7.	10601	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
8.	10701	Dinas Perhubungan
9.	10804	Dinas Kebersihan
10.	10805	Badan Lingkungan Hidup
11.	11001	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
12.	11102	Kantor Pemberdayaan Perempuan
13.	11202	Badan Pengendalian Kependudukan dan KB
14.	11402	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
15.	11501	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
16.	11703	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
17.	11801	Dinas Pemuda dan Olahraga
18.	11903	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
19.	11904	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas
20.	12001	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
21.	12002	Walikota dan Wakil Walikota
22.	12003	Sekretariat Daerah
23.	12004	Sekretariat DPRD
24.	12005	Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
25.	12007	Inspektorat
26.	12011	Kecamatan Kota Ternate Utara
27.	12012	Kecamatan Kota Ternate Selatan
28.	12013	Kecamatan Pulau Ternate
29.	12014	Kecamatan Moti
30.	12015	Kecamatan Kota Ternate Tengah
31.	12016	Kecamatan Pulau Badan Dua
32.	12017	Kecamatan Hiri
33.	12018	Badan Penganggulangan Bencana Daerah.
35.	12102	Badan Kepegawaian Daerah

No.Urut	Kode SKPD	Nama SKPD
36.	12402	Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah.
37.	12503	Kantor Komunikasi dan Informatika
38.	20105	Dinas Pertanian dan Kehutanan
39.	20106	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian (BP4K)
40.	20501	Dinas Kelautan dan Perikanan
41.	20602	Dinas Pasar
42.	20702	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Sejalan dengan ditetapkannya peraturan perundang-undangan tersebut maka pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kota Ternate dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi, yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Di dalamnya memuat tentang hak dan kewajiban daerah yang dibayarkan dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan serta disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, dilaksanakan berdasarkan kemampuan pendapatan daerah, yang mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi distribusi dan stabilisasi, dan meningkatkan efisiensi pengelolaan APBD baik dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan.

2.2.1. Kebijakan Pendapatan

Untuk tahun 2010, kebijakan fiskal yang merupakan bagian integral dari kebijakan ekonomi makro, akan tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi makro guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas, dan tetap mengupayakan stimulus fiskal dalam batas-batas yang dapat ditopang oleh sumber-sumber pembiayaan yang tersedia.

Mengacu pada tantangan-tantangan tersebut, strategi kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kota Ternate pada tahun 2011 akan diarahkan pada langkah-langkah antara lain: (1) Mengoptimalkan penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik pajak, retribusi dan pendapatan lain yang sah tanpa memberatkan dunia usaha dan masyarakat; (2) Mengupayakan peningkatan penerimaan dari dana perimbangan terutama dana bagi hasil pengelolaan sumber daya alam secara lebih adil; (3) Membenahi dan memperkuat sistem informasi dan kelembagaan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan berbagai asset daerah; (4) Menggali dan mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru dan yang sah.

Pengelolaan pendapatan daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan diubah untuk keduanya dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dengan ketentuan ini maka struktur Pendapatan Daerah Kota Ternate terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - a. Pendapatan Pajak Daerah
 - b. Pendapatan Retribusi Daerah
 - c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
 - d. Lain-Lain PAD yang Sah.
2. Pendapatan Transfer terdiri dari:
 - a. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan
 - 1) Dana Bagi Hasil Pajak yang terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pajak Penghasilan (PPh) Perorangan
 - 2) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
 - 3) Dana Alokasi Umum, dan
 - 4) Dana Alokasi Khusus
3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah terdiri dari:
 - a. Pendapatan Hibah
 - b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
 - c. Dana Penyesuaian

Berdasarkan pertimbangan perkembangan keuangan daerah yang dituangkan dalam RPJM Kota Ternate Tahun 2011-2015, maka kebijakan pendapatan daerah Kota Ternate diarahkanpada hal-hal berikut:

1. Mengoptimalkan penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik pajak, retribusi dan pendapatan lain yang sah tanpa memberatkan dunia usaha dan masyarakat melalui berbagai langkah sebagai berikut:
 - a. Membenahi dan memantapkan sistem dan prosedur administrasi dalam pemungutan, pencatatan dan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
 - b. Meningkatkan sosialisasi dan pelayanan perpajakan untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah;
 - c. Melakukan evaluasi dan revisi secara berkala terhadap berbagai peraturan daerah yang mengatur pajak dan retribusi daerah;
 - d. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan;
 - e. Melakukan intensifikasi pemungutan Pajak Daerah melalui razia di lapangan secara terus-menerus dan menggali sumber pajak baru dan penagihan tunggakan dengan cara persuasif yang ditindaklanjuti dengan penagihan secara paksa sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Selain itu juga diupayakan melalui peningkatan kendaraan bermotor asal luar daerah yang mutasi ke Kota Ternate.

- f. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan gedung/asrama/aula yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Ternate sehingga dapat memberikan layanan yang lebih baik dan meningkatkan retribusi sewa dari gedung/asrama/aula tersebut;
 - g. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam memberikan pelayanan publik dan meningkatkan pendapatan daerah termasuk meningkatkan bagian laba PD. Citra Gamalama dan PDAM;
 - h. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota dan berbagai pihak terkait lainnya dalam pemungutan, pencatatan dan pengelolaan pendapatan daerah.
2. Mengupayakan peningkatan penerimaan dari dana perimbangan terutama dana bagi hasil pengelolaan sumberdaya alam secara lebih adil.
 - a. Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPH OPDN), PPh Pasal 21 dan BPHTB;
 - b. Mengembangkan datadasar dan sistem informasi yang akurat dalam pendataan sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dana perimbangan;
 - c. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam pengalokasian dan pengelolaan dana perimbangan;
 - d. Mengupayakan tersedianya Dana Alokasi Khusus sebagai kompensasi dari pengurangan Dana Alokasi Umum yang mulai tahun 2010 diperkirakan tidak tersedia lagi.
 3. Membenahi dan memperkuat sistem informasi dan kelembagaan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan berbagai aset daerah;
 4. Menggali dan mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru dan yang sah.
- Dengan berbagai kebijakan tersebut, pendapatan daerah Kota Ternate diharapkan dapat meningkat sesuai dengan target yang ingin dicapai.

2.2.2. Kebijakan Belanja

Kebijakan Umum Keuangan Daerah dalam perencanaan program dan kegiatan mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, dan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 18 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan ketentuan tersebut maka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dapat dikelola dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat.

Adapun kebijakan Belanja Tahun Anggaran 2011, antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan dan Penataan Infrastruktur Perkotaan serta Percepatan dan Pemerataan Infrastruktur pada Wilayah Kecamatan.

2. Mewujudkan Pendidikan Murah, Terjangkau dan Berkualitas.
3. Mewujudkan Kesehatan Murah, Terjangkau dan Berkualitas.
4. Kebijakan Anggaran (APBD) yang Proporsional dan Pro Rakyat
5. Penataan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Kota yang Serasi antara Kebutuhan dan Daya Dukung Lahan, antar Aspek Topografi dan Kawasan Pantai/Pesisir Berbasis Keterpaduan dan Keserasian Lingkungan Sosial Budaya dan Ekologis.
6. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik, dengan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang Profesional, Bersih dan Berwibawa, serta Birokrasi yang Efisien, Efektif, Kreatif, Inovatif dan Responsif.
7. Peningkatan Ekonomi Rakyat, melalui Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perluasan Lapangan Kerja.
8. Pelayanan Publik yang Cepat, Murah dan Mudah.
9. Pengembangan Masyarakat Kawasan Pesisir Secara Berkelanjutan.
10. Membangun Kepedulian Sosial, Kesadaran Nilai Keagamaan, Kebudayaan dan Adat Istiadat.
11. Penegakan Supremasi Hukum, Hak Azasi Manusia, untuk Mendorong Partisipasi Publik yang Dinamis dan Konstruktif.

2.2.3. Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2011 terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, dan penjualan investasi permanen lainnya. Adapun penerimaan pembiayaan tahun 2011 diperoleh dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun yang lalu yaitu Tahun Anggaran 2010.

Kebijakan penerimaan pembiayaan Kota Ternate tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut:

- a. Mencegah terjadinya Sisa Lebih Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) dengan menerapkan perencanaan dan penganggaran secara terpadu dan konsisten, serta prinsip perencanaan dan anggaran berbasis kinerja.
- b. Mengembangkan skema pengelolaan pinjaman baik dari dalam maupun luar negeri melalui penerbitan obligasi daerah ataupun bentuk pinjaman lainnya untuk membiayai pembangunan infrastruktur publik ataupun program dan kegiatan strategis lainnya.
2. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, yang mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan

modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan Kota Ternate tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut:

- a. Mendorong percepatan pengembangan ekonomi daerah melalui pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal BUMD. Penyertaan modal BUMD dibarengi dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD.
- b. Menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan pinjaman daerah pada saat terjadi defisit anggaran.
- c. Mendukung penyertaan modal dan pemberian pinjaman pada saat terjadi surplus anggaran dengan tetap mempertimbangkan kesinambungan fiskal daerah dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

2.3.1. Capaian Target Kinerja Pendapatan

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dapat disampaikan secara garis besar sebagai berikut. Pendapatan Daerah realisasinya sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 mencapai Rp527.081.539.018,89 dari target setelah perubahan sebesar Rp537.609.031.800,00 atau 98,04%, dengan demikian realisasi Pendapatan Daerah kurang dari target sebesar 1,96%. Apabila dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2010 yang tercatat sebesar 98,56% maka kinerja Pendapatan Daerah tahun 2011 terjadi penurunan sebesar 0,53%.

Realisasi Pendapatan Daerah tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) realisasinya mencapai 98,64%, dari realisasi ini tidak mencapai target PAD sebesar 1,36%. Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi PAD Tahun Anggaran 2010, tercatat realisasi PAD Tahun Anggaran 2011 naik sebesar 18,97%. Di sisi lain yaitu Pendapatan Transfer yang bersumber dari Dana Perimbangan dan dana transfer lainnya realisasi pencapaian targetnya tercatat sebesar 97,93%, realisasi tersebut tidak mencapai target sebesar 2,07%. Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2010 sebesar 99,83% tercatat realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2011 turun sebesar 1,90%. Sedangkan untuk Lain-lain Pendapatan Yang Sah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 realisasinya mencapai 162,68%. Apabila dibandingkan dengan Lain-lain Pendapatan Yang Sah Tahun Anggaran 2010 sebesar 97,55% tercatat realisasi anggaran Tahun Anggaran 2011 naik sebesar 65,13%.

2.3.2. Capaian Target Kinerja Belanja Daerah

Target pencapaian Belanja Daerah sebesar Rp564.136.838.942,00 sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 realisasinya sebesar Rp531.953.442.503,00 atau 94,30%, sehingga sisa anggaran belanja di tahun 2011 yang tidak dapat

diserap sebesar Rp32.183.396.439,00 atau 5,70%. Apabila dibandingkan dengan kinerja Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 yang dianggarkan sebesar Rp488.170.772.768,00 realisasinya tercatat sebesar Rp454.843.014.632,00 atau 93,17%, maka kinerja Belanja Daerah di tahun 2011 mengalami kenaikan persentase sebesar 4,70%.

2.3.3. Capaian Target Kinerja Pembiayaan

Target pencapaian Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp28.624.807.142,00 sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 realisasinya sebesar Rp6.827.669.059,00 atau 23,97%, Apabila dibandingkan dengan kinerja Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2010 yang dianggarkan sebesar Rp22.668.644.968,00 realisasinya tercatat sebesar Rp2.871.609.770,00 atau 12,67%, maka kinerja Penerimaan Pembiayaan di tahun 2011 mengalami peningkatan persentase sebesar 11,30%.

Target pencapaian Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp2.097.000.000,00 sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 realisasinya sebesar Rp2.097.000.000,00 atau 100,00%. Pada tahun 2010 tidak ada dianggarkan pengeluaran pembiayaan.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011 dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1.1. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Realisasi pencapaian target kinerja Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2011 telah mencapai hasil yang cukup memuaskan Hal ini dapat tergambar pada Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2011 yang ditargetkan sebesar Rp537.609.031.800,00 tercapai realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 tercatat sebesar Rp527.081.539.018,89 atau 98,04% dari anggaran yang ditetapkan. Dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2010 yang tercatat sebesar Rp458.814.473.921,00 Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar Rp68.267.065.097,89 atau 14,88 %.

Penjabaran realisasi pendapatan tersebut diatas adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah

Target pendapatan asli daerah pada tahun 2011 sebesar Rp32.200.000.000,00 dan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp31.318.111.818,00 atau 97,26%. dengan rincian sebagai berikut:

1. Pajak Daerah

Target pajak daerah pada tahun 2011 sebesar Rp14.500.000.000,00 dan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp15.477.846.926,00 atau 106,74%

2. Retribusi Daerah

Target retribusi daerah pada tahun 2011 sebesar Rp11.425.000.000,00 dan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp11.076.007.458,00 atau 96,95%

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada tahun 2011 sebesar Rp500.000.000,00 dan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp263.772.207,00 atau 52,75%

4. Lain-lain PAD Yang Sah

Target Lain-lain PAD Yang Sah pada tahun 2011 sebesar Rp5.775.000.000,00 dan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp4.500.485.227,00 atau 77,93%

b. Dana Perimbangan

Target Dana Perimbangan pada tahun 2011 sebesar Rp504.149.031.800,00 dan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp493.702.871.653,00 atau 97,93% dengan rincian sebagai berikut:

1. Bagi Hasil Pajak

Target Bagi Hasil Pajak pada tahun 2011 sebesar Rp52.009.000.000,00 dan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp42.799.147.368,00 atau 82,29%

2. Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Target Bagi Hasil Sumber Daya Alam pada tahun 2011 sebesar Rp11.377.000.000,00 dan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp8.001.804.746,00 atau 70,33%
 3. Dana Alokasi Umum
Target Dana Alokasi Umum pada tahun 2011 sebesar Rp314.020.640.000,00 dan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp313.861.356.000,00 atau 99,95%
 4. Dana Alokasi Khusus
Target Dana Alokasi Khusus pada tahun 2011 sebesar Rp29.522.900.000,00 dan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp29.521.400.000,00 atau 99,99%
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**
Target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun 2011 sebesar Rp98.479.491.800,00 dan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp101.579.719.086,89 atau 103,14%. dengan rincian sebagai berikut:
1. Hibah
Target Hibah pada tahun 2011 sebesar Rp1.260.000.000,00 dan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp1.932.377.641,89 atau 153,38%
 2. Dana Penyesuaian
Target Dana Penyesuaian pada tahun 2011 sebesar Rp81.509.491.800,00 dan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp85.416.616.880,00 atau 104,79%
 3. Bantuan Keuangan dari Provinsi
Target Bantuan Keuangan dari Provinsi pada tahun 2011 sebesar Rp15.710.000.000,00 dan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp14.102.546.659,00 atau 89,77%
 4. Penerimaan Lainnya
Dengan realisasi sebesar Rp128.177.906,00

Permasalahan dan solusi

Adapun permasalahan dan solusi di bidang pendapatan daerah dalam tahun 2011, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Permasalahan
 1. Kurangnya kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi dan kewajibannya terhadap daerah.
 2. Kurangnya koordinasi dinas-dinas pengelola pendapatan asli daerah.
 3. Kurangnya kualitas SDM dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan pendapatan daerah.
- b. Solusi
 1. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi dengan melakukan sosialisasi peraturan daerah kepada masyarakat secara intens.
 2. Menegakkan sanksi yang tegas kepada wajib pajak yang sengaja melalaikan kewajibannya.
 3. Melakukan koordinasi secara rutin bagi dinas-dinas pengelola pendapatan daerah.

4. Meningkatkan kualitas petugas (SDM) dengan mengikutsertakan pada kegiatan-kegiatan pelatihan, seminar, dan lain sebagainya yang terkait dengan pengelolaan dan peningkatan pendapatan daerah.

3.1.2. Target dan Realisasi Belanja Daerah

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 semula ditargetkan sebesar Rp532.218.982.064,00. Setelah ditetapkannya perubahan anggaran tahun 2011 target Belanja Daerah naik sebesar Rp31.917.856.878,00 atau 6,00% menjadi sebesar Rp564.136.838.942,00. Realisasi Belanja Daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp531.953.442.503,00 atau 94,30%. Dengan demikian jumlah anggaran belanja yang tidak dapat diserap sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp32.183.396.439,00 atau 5,7%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 yang jumlahnya tercatat Rp454.843.014.632,00, terlihat realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 naik sebesar Rp77.110.427.871,00 atau 16,95%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Belanja Daerah tahun 2011 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Rincian belanja daerah tersebut adalah sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Target Belanja Pegawai pada tahun 2011 sebesar Rp328.896.826.025,00 dan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp324.603.284.220,00 atau 98,69%.

b. Belanja Barang dan Jasa

Target Belanja Barang dan Jasa pada tahun 2011 sebesar Rp101.319.424.386,00 dan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp95.467.534.328,00 atau 94,25%.

c. Belanja Hibah

Target Belanja Hibah pada tahun 2011 sebesar Rp4.921.325.000,00 dan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp5.051.843.750,00 atau 102,65%.

d. Belanja Bantuan Sosial

Target Belanja Bantuan Sosial pada tahun 2011 sebesar Rp7.898.500.000,00 dan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp7.864.808.170,00 atau 99,57%.

e. Belanja Modal

Target Belanja Modal pada tahun 2011 sebesar Rp117.350.763.531,00 dan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp94.165.997.035,00 atau 80,24%.

f. Belanja Tidak Terduga

Target Belanja Tidak Terduga pada tahun 2011 sebesar Rp3.750.000.000,00 dan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp4.799.975.000,00 atau 128,00%.

Permasalahan dan solusi

Adapun permasalahan dan solusi di bidang belanja daerah dalam tahun 2011, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Permasalahan

1. Kebijakan regulasi yang begitu cepat berubah menyebabkan masih adanya sebagian komponen belanja yang belum dapat disesuaikan dengan pedoman yang baru.
 2. Penyusunan laporan-laporan SKPD terkait belanja masih banyak yang tidak tepat waktu.
- b. Solusi
1. Perlu adanya sosialisasi untuk kebijakan regulasi pengelolaan belanja sesuai pedoman yang baru.
 2. Memberikan sanksi yang tegas kepada pihak-pihak terlambat menyampaikan laporan terkait belanja.

3.1.3. Pembiayaan Daerah

Realisasi Pembiayaan Daerah dari sisi penerimaan bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2010 sebesar Rp6.843.069.059,00 Sedangkan realisasi Pembiayaan Daerah dari sisi pengeluaran sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp2.097.000.000,00 yang terdiri dari penyertaan modal Bank Pembiayaan Rakyat, Bank Rakyat syariah dan PD Citra Gamalama kota.

Dari gambaran realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan tersebut dapat dilihat posisi SiLPA Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut:

1. Pendapatan yang tidak mencapai target di Tahun Anggaran 2011 Rp 10.527.492.781,11
2. Sisa anggaran belanja yang tidak dapat diserap sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 Rp 32.183.396.439,00
3. Sisa anggaran pembiayaan Rp 4.730.669.059,00

Dengan demikian jumlah SiLPA Tahun Anggaran 2011 tercatat sebesar Rp(141.234.425,11).

Jumlah SiLPA Tahun Anggaran 2011 akibat dampak dari tidak terealisasinya anggaran penerimaan pinjaman sebesar Rp21.781.738.083,00 sehingga menyebabkan likuiditas keuangan Pemerintah Kota Ternate tahun 2011 menurun.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ternate Tahun Anggaran 2011 terdiri dari beberapa komponen yaitu:

1. Neraca
2. Laporan Realisasi Anggaran
3. Laporan Arus Kas
4. Catatan atas Laporan Keuangan.

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas pelaporan, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan yaitu Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Ternate.

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Ternate adalah unit yang ditetapkan sebagai bendaharawan umum daerah.

Transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam bentuk barang dan jasa dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran sesuai realisasi pada tanggal transaksi. Selanjutnya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diterima.

Pemerintah Kota Ternate dalam menyusun laporan keuangan konsolidasian dari 42 Satuan Kerja Perangkat Daerah. Proses konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang ada antara SKPD satu dengan SKPD lainnya yang secara organisatoris berada di bawahnya.

Sistem akuntansi pemerintahan daerah pada tingkat pemerintah daerah, dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang berada pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dalam hal ini Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Ternate dan sistem akuntansi pemerintahan daerah pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD).

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, yang umumnya bercirikan:

1. Entitas tersebut dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran;
2. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
3. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat; dan
4. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya, wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi, menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi, dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.

Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi, yang secara organisatoris berada di bawahnya. Entitas pelaporan keuangan daerah adalah Pemerintah Kota Ternate.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Transaksi dan kejadian diakui atas dasar *cash towards accrual* yaitu merupakan kombinasi dasar kas dengan dasar akrual. Dalam penyusunan laporan keuangan, basis akuntansi yang digunakan adalah:

1. Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Daerah atau dikeluarkan dari Kas Umum Daerah.
2. Penyajian pos-pos neraca berupa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari Kas Umum Daerah.

4.3 Basis Pengukuran yang Digunakan Dalam Penyusunan Laporan Keuangan

1. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.
2. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah menggunakan nilai perolehan historis.
3. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.
4. Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban, atau nilai sekarang dari jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk melaksanakan kewajiban tersebut.
5. Pengukuran laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu (kurs tengah Bank Indonesia) dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

4.3.2 Akuntansi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar dan Aset Non Lancar, dengan penjelasan sebagai berikut:

4.3.5.1 Aset Lancar

Aset lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi. Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

a. Kas dan Setara kas

Kas terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di Bendahara Pengeluaran. Setara kas terdiri dari simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 bulan dan investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan. Kas diukur dicatat sebesar nilai nominal.

b. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek terdiri dari deposito lebih dari 3 (tiga) bulan, kurang dari 12 (dua belas) bulan, Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan Surat Perbendaharaan Negara (SPN). Investasi jangka pendek dicatat sebesar biaya perolehan.

c. Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai piutang yang belum dilunasi.

d. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan disajikan sebesar nilai perolehan.

4.3.5.2 Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari satu tahun. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu nonpermanen dan permanen.

a. Investasi Nonpermanen

Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Investasi terdiri dari bantuan modal dalam bentuk dana bergulir.

b. Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi permanen terdiri dari:

- 1) Penyertaan modal pemerintah daerah/ekuitas kepada Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD), lembaga keuangan negara, badan hukum milik negara, dan badan usaha lainnya milik negara
- 2) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dipertukarkan atau dialihkan kepada pihak ketiga.
- 3) Investasi permanen lainnya yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan.

4.3.5.3 Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah daerah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan yang dikuasai. Aset terdiri dari:

- a. Tanah
- b. Peralatan dan mesin
- c. Gedung dan Bangunan
- d. Jalan, irigasi dan jaringan
- e. Aset tetap lainnya
- f. Konstruksi dalam pengerjaan

Batas pengeluaran yang harus dikapitalisir sebagai aset tetap adalah yang harga perolehan per unitnya 1 juta rupiah. Batasan jumlah biaya untuk pemeliharaan, penambahan, penggantian dan perbaikan aset tetap sebesar 5% dari nilai harga perolehan, sebagai

penambahan nilai aset tetap. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara handal.
- c. Biaya-biaya bersama non fisik dalam rangka memperoleh beberapa aset tetap yang harusnya menambah kapitalisasi masing-masing aset tetap belum diatur dalam kebijakan akuntansi begamana teknik pendistribusiannya. Namun pemerintah Kota Ternate melakukan atribusi secara proporsional berdasarkan besaran jumlah belanja modal masing-masing kegiatan mengingat biaya-biaya tersebut memang seharusnya dikapitalisasi menambah aset-aset yang bersangkutan.

4.3.5.4 Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah daerah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana cadangan dan Lain-lain aset.

4.3.6 Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah daerah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.

Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban pemerintah daerah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

- 1) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan akan diselesaikan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- 2) Kewajiban jangka pendek meliputi Bagian Bagian Lancar Utang Luar Negeri, Bagian Lancar Hutang Luar kepada Pemerintah Pusat, Bagian Lancar Hutang kepada Pemerintah Daerah Otonomi Lainnya, Bagian Lancar Hutang kepada BUMN/BUMD, Bagian Lancar Hutang kepada Bank/Lembaga Keuangan, Hutang Biaya Pinjaman (Denda, Biaya Administrasi dan Lain-Lain) dan Hutang atas Perhitungan Pihak Ketiga.

- b. Kewajiban Jangka Panjang
 - 1) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
 - 2) Kewajiban jangka panjang pemerintah daerah terdiri dari:
 - a. Hutang Luar Negeri,
 - b. Hutang Kepada Pemerintah Pusat,
 - c. Hutang Kepada Pemerintah Daerah Otonomi Lainnya,
 - d. Hutang kepada BUMN/BUMD,
 - e. Hutang kepada Bank/Lembaga Keuangan
 - f. Hutang Dalam Negeri Lainnya, dan
 - g. Hutang Bunga

4.3.7 Akuntansi Ekuitas Dana

Mengatur perlakuan akuntansi sekuitas dana yang mencakup definisi, pengakuan, pengukuran penilaian dan pengungkapan ekuitas dana. Ekuitas Dana merupakan kekayaan bersih pemerintah daerah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah daerah.

4.3.8 Pengakuan Pendapatan dan Belanja

Seluruh pendapatan diakui pada saat diterima dan telah dibukukan pada Kas Daerah, sedangkan belanja diakui pada saat dikeluarkan dari Kas Daerah dan telah diotorisasikan melalui pengesahan pihak yang berwenang.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Penyusunan pos-pos laporan keuangan Pemerintah Kota Ternate tahun anggaran 2011 mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penyajian informasi pada laporan keuangan ini tentunya belum sempurna, namun dicoba untuk disajikan dengan hati-hati dan cermat sesuai dengan acuan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan untuk memenuhi pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Didalam pelaksanaannya apabila ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, maka dilakukan perbaikan melalui media *adjustment* atau jurnal koreksi atas pos-pos laporan keuangan dan pada akhirnya semua pencatatan *auditable* sehingga dapat dilakukan pemeriksaan mengenai kewajaran laporan keuangan ini (*auditable*).

Kebijakan Akuntansi yang belum diterapkan atas pos-pos laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu aset tetap belum dilakukan penyusutan. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan peraturan perundang-undangan lainnya belum dilaksanakan dengan baik dan benar, karena terbentur masalah sumber daya/aparaturnya yang masih belum memadai.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA
TERNATE TAHUN ANGGARAN 2011

5.1 Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos-pos Pelaporan Keuangan

Penyajian laporan keuangan Pemerintah Kota Ternate Tahun Anggaran 2011 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 yang ditetapkan sebagai Petunjuk Pelaksanaan. Sedangkan teknik penyusunan laporan keuangan telah dilakukan dengan cara konsolidasi yaitu penggabungan laporan keuangan SKPD selaku entitas yang secara struktural berada dibawahnya. Penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) utamanya yang berkaitan dengan realisasi belanja daerah, sepenuhnya dapat disajikan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

5.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Realisasi Pendapatan Daerah Kota Ternate Tahun Anggaran 2011 dapat dirinci secara garis besar sebagai berikut. Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2011 semula ditargetkan sebesar Rp510.933.877.800,00 setelah ditetapkannya perubahan anggaran tahun 2011 target tersebut naik sebesar Rp26.675.154.000,00 atau 5,22% menjadi Rp537.609.031.800,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 mencapai Rp527.081.539.018,89 atau 98,04%, dengan demikian realisasi Pendapatan Daerah tidak mencapai target yang ditetapkan sebesar Rp10.527.492.781,11 atau 1,96%.

Realisasi Pendapatan Daerah tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp31.318.111.818,00, dan Pendapatan Transfer sebesar Rp493.702.871.653,00, sedangkan untuk Lain-lain Pendapatan yang Sah memiliki realisasi pendapatan sebesar Rp2.060.555.547,89.

Apabila realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2011 yang mencapai sebesar Rp527.081.539.018,89 dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2010 yang tercatat sebesar Rp458.814.473.921,00, realisasi Pendapatan Daerah di tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar Rp68.267.065.097,89 atau Rp14,88%.

Untuk lebih jelasnya realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2011 dapat digambarkan pada tabel berikut ini.

No.	Jenis	Tahun Anggaran 2011			%	Realisasi 2010 (Rp)
		Anggaran Semula (Rp)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi 2011 (Rp)		
1	2	3	4	5	6 (5:4)	7
1	Pendapatan Asli Daerah	29.820.000.000,00	32.200.000.000,00	31.318.111.818,00	97,26	21.442.993.424,00
2	Dana Transfer	479.853.877.800,00	504.149.031.800,00	493.702.871.653,00	97,93	417.075.237.962,00
3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	1.260.000.000,00	1.260.000.000,00	2.060.555.547,89	163,54	20.296.242.535,00
	Jumlah	510.933.877.800,00	537.609.031.800,00	527.081.539.018,89	98,04	458.814.473.921,00

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bertujuan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menggali potensi pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

PAD Tahun Anggaran 2011 semula ditargetkan sebesar Rp29.820.000.000,00 setelah ditetapkannya perubahan anggaran tahun 2011 target tersebut naik Rp2.380.000.000,00 atau 7,98% menjadi Rp32.200.000.000,00. Realisasi PAD sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 mencapai Rp31.318.111.818,00 atau 97,26%. Realisasi PAD tersebut dibawah target sebesar Rp881.888.182,00 atau 2,74%.

Apabila realisasi PAD tahun 2011 dibandingkan dengan realisasi PAD tahun 2010 yang tercatat sebesar Rp21.442.993.424,00 pendapatan PAD di tahun 2011 terjadi peningkatan sebesar Rp9.875.118.394,00 atau 46.05%.

Secara garis besar gambaran realisasi PAD Tahun Anggaran 2011 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No.	Jenis	Tahun Anggaran 2011			%	Realisasi 2010 (Rp)
		Anggaran Semula (Rp)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi 2011 (Rp)		
1	2	3	4	5	6 (5:4)	7
1	Pajak Daerah	12.900.000.000,00	14.500.000.000,00	15.477.846.926,00	106,74	8.187.014.548,00
2	Retribusi Daerah	10.745.000.000,00	11.425.000.000,00	10.977.469.958,00	96,08	9.847.526.379,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	500.000.000,00	500.000.000,00	263.772.207,00	52,75	304.761.759,00
4	Lain-lain PAD	5.675.000.000	5.775.000.000	4.599.022.727,00	79,64	3.103.690.738,00
	Jumlah	29.820.000.000,00	32.200.000.000,00	31.318.111.818,00	97,26	21.442.993.424,00

Lebih lanjut penjelasan mengenai rincian realisasi PAD disampaikan berikut ini:

1. Pajak Daerah

Akun	Tahun 2011 (Rp)	Tahun 2010 (Rp)
Pajak Daerah	15.477.846.926	8.187.014.548

Realisasi penerimaan Pajak Daerah Tahun 2011 seperti tampak pada tabel tersebut di atas, melampaui target anggaran yang ditetapkan setelah perubahan. Pajak Daerah Tahun Anggaran 2011 semula ditargetkan sebesar Rp12.900.000.000,00 setelah ditetapkannya perubahan anggaran tahun 2011 target tersebut naik sebesar Rp1.600.000.000,00 atau 12,40% menjadi Rp14.500.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp15.477.846.926,00 atau 106,74%, dengan demikian realisasi Pajak Daerah melampaui target sebesar Rp977.846.926,00 atau 6,74%.

Apabila realisasi Pajak Daerah tahun 2011 dibandingkan dengan realisasi tahun 2010 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp8.187.014.548,00 maka terlihat pendapatan pajak di tahun 2011 naik sebesar Rp7.290.832.378,00 atau 89.05%.

Lebih rinci mengenai realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2011 digambarkan pada tabel berikut:

No	Uraian	Tahun Anggaran 2011			%	Realisasi 2010 (Rp)
		Anggaran Semula (Rp)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi 2011 (Rp)		
1	2	3	4	5	6 (5:4)	7
1.	Pajak Hotel	850.000.000,00	850.000.000,00	1.091.690.619,00	128,43	844.677.511,00
2.	Pajak Restoran	1.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.627.943.203,00	131,40	1.017.904.162,00
3.	Pajak Hiburan	100.000.000,00	100.000.000,00	78.112.450,00	78,11	36.029.750,00
4.	Pajak Reklame	800.000.000,00	800.000.000,00	782.992.550,00	97,87	606.597.700,00
5.	Pajak Penerangan Jalan	4.400.000.000,00	5.000.000.000,00	7.332.307.359,00	146,65	4.390.135.425,00
6.	Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.125.958.000,00	106,30	1.291.670.000,00
7.	Pajak Parkir	200.000.000,00	200.000.000,00	42.267.540,00	21,13	0
8.	Pajak Air Bawah Tanah	950.000.000,00	950.000.000,00	107.395.280,00	11,30	0
9.	BPHTB	2.600.000.000,00	2.600.000.000,00	1.289.179.925,00	49,58	0
	Jumlah	12.900.000.000,00	14.500.000.000,00	15.477.846.926,00	106,74	8.187.014.548,00

Penjelasan lebih lanjut mengenai realisasi penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2011 diuraikan sebagai berikut:

a. Pajak Hotel

Akun	Tahun 2011 (Rp)	Tahun 2010 (Rp)
Pajak Hotel	1.091.690.619,00	844.677.511,00

Pajak Hotel Tahun Anggaran 2011 semula ditargetkan sebesar Rp850.000.000,00, setelah ditetapkan perubahan anggaran tahun 2011 target tersebut tidak mengalami kenaikan/penurunan anggaran. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp1.091.690.619,00 atau 128,43%, dengan demikian realisasi penerimaan pajak ini melampaui target sebesar Rp241.690.619,00 atau 28,43%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Hotel Tahun Anggaran 2010 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp844.677.511,00 terlihat realisasi Pajak Hotel Tahun Anggaran 2011 naik sebesar Rp247.013.108,00 atau 29,24%.

b. Pajak Restoran

Akun	Tahun 2011 (Rp)	Tahun 2010 (Rp)
Pajak Restoran	2.627.943.203,00	1.017.904.162,00

Pajak Restoran Tahun Anggaran 2011 semula ditargetkan sebesar Rp1.000.000.000,00 setelah ditetapkan perubahan anggaran tahun 2011 target tersebut Naik sebesar Rp1.000.000.000,00 atau 50,00% menjadi Rp2.000.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 mencapai Rp2.627.943.203,00 atau 131,40%, dengan demikian, realisasi penerimaan pajak ini melampaui target sebesar Rp627.943.203,00 atau 31,40%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Restoran Tahun Anggaran 2010 yang jumlahnya mencapai Rp1.017.904.162,00 maka terlihat kontribusi Pajak Restoran Tahun Anggaran 2011 naik sebesar Rp1.610.039.041,00 atau 158,17%.

c. Pajak Hiburan

Akun	Tahun 2011 (Rp)	Tahun 2010 (Rp)
Pajak Hiburan	78.112.450,00	36.029.750,00

Pajak Hiburan Tahun Anggaran 2011 semula ditargetkan sebesar Rp100.000.000,00, setelah ditetapkannya perubahan anggaran tahun 2011 target tersebut tidak mengalami kenaikan/penurunan anggaran. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 mencapai Rp78.112.450,00 atau 78,11%, dengan demikian realisasi Pajak Hiburan tidak dapat mencapai target sebesar Rp21.887.550,00 atau 21,89%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Pajak Hiburan Tahun Anggaran 2010 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp36.029.750,00 terlihat realisasi Pajak Hiburan Tahun Anggaran 2011 naik sebesar Rp42.082.700,00 atau 116,8%.

d. Pajak Reklame

Akun	Tahun 2011 (Rp)	Tahun 2010 (Rp)
Pajak Reklame	782.992.550,00	606.597.700,00

Pajak Reklame Tahun Anggaran 2011 semula ditargetkan sebesar Rp800.000.000,00, setelah ditetapkannya perubahan anggaran tahun 2011 target tersebut tidak mengalami kenaikan/penurunan anggaran. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp782.992.550,00 atau 97,87%, dengan demikian realisasi Pajak Reklame tidak dapat mencapai target sebesar Rp17.007.450,00 atau 2,13%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Reklame Tahun Anggaran 2010 yang jumlahnya tercatat Rp606.597.700,00, terlihat kontribusi Pajak Reklame Tahun Anggaran 2011 naik sebesar Rp176.394.850,00 atau 29,08%.

e. Pajak Penerangan Jalan

Akun	Tahun 2011 (Rp)	Tahun 2010 (Rp)
Pajak Penerangan Jalan	7.332.307.359,00	4.390.135.425,00

Pajak Penerangan Jalan Tahun Anggaran 2011 semula ditargetkan sebesar Rp4.400.000.000,00 setelah ditetapkannya perubahan anggaran tahun 2011 target tersebut naik sebesar Rp600.000.000,00 atau 13,64% menjadi Rp5.000.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 mencapai Rp7.332.307.359,00 atau 146,65%, dengan demikian realisasi penerimaan pajak ini dapat melampaui target yang telah ditetapkan sebesar Rp2.332.307.359,00 atau 46,65%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Pajak Penerangan Jalan Tahun Anggaran 2010 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp4.390.135.425,00 maka kontribusi Pajak Penerangan Jalan Tahun Anggaran 2011 terjadi peningkatan sebesar Rp2.942.171.934,00 atau 67,02 %.

f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C

Akun	Tahun 2011 (Rp)	Tahun 2010 (Rp)
Pajak Pengambilan Bahan galian Gol C	2.125.958.000	1.291.670.000

Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C Tahun Anggaran 2011 semula ditargetkan sebesar Rp2.000.000.000,00 , setelah ditetapkannya perubahan anggaran tahun 2011 target tersebut tidak mengalami kenaikan/penurunan anggaran. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 mencapai Rp2.125.958.000,00 atau 106,30%, dengan demikian realisasi Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C dapat melampaui target sebesar Rp125.958.000,00 atau 6,29%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C Tahun Anggaran 2010 yang jumlahnya tercatat Rp1.291.670.000,00 terlihat kontribusi Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C Tahun Anggaran 2011 terjadi kenaikan sebesar Rp834.288.000,00 atau 64,58%.

g. Pajak Parkir

Akun	Tahun 2011 (Rp)	Tahun 2010 (Rp)
Pajak Parkir	42.267.540	-

Pajak Parkir Tahun Anggaran 2011 semula ditargetkan sebesar Rp200.000.000,00, setelah ditetapkannya perubahan anggaran tahun 2011 target tersebut tidak mengalami kenaikan/penurunan anggaran. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 mencapai Rp42.267.540,00 atau 21,13%, dengan demikian realisasi Pajak Parkir tidak dapat mencapai target sebesar Rp157.732.460,00 atau 78,87%.

h. Pajak Air Bawah Tanah

Akun	Tahun 2011 (Rp)	Tahun 2010 (Rp)
Pajak Air Bawah Tanah	107.395.280,00	-

Pajak Air Bawah Tanah Tahun Anggaran 2011 semula ditargetkan sebesar Rp950.000.000,00, setelah ditetapkannya perubahan anggaran tahun 2011 target tersebut tidak mengalami kenaikan/penurunan anggaran. Realisasi sampai dengan akhir Tahun

Anggaran 2011 mencapai Rp107.395.280,00 atau 11,30%, dengan demikian realisasi Pajak Air Bawah Tanah tidak dapat mencapai target sebesar Rp842.604.720,00 atau 88,70%.

i. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Akun	Tahun 2011 (Rp)	Tahun 2010 (Rp)
Pajak BPHTB	1.289.179.925,00	5.339.692.137,00

Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Tahun Anggaran 2011 semula ditargetkan sebesar Rp2.600.000.000,00, setelah ditetapkannya perubahan anggaran tahun 2011 target tersebut tidak mengalami kenaikan/penurunan anggaran. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 mencapai Rp1.289.179.925,00 atau 49,58%, dengan demikian realisasi Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tidak dapat mencapai target sebesar Rp1.310.820.075,00 atau 50,42%.

2. Retribusi Daerah

Akun	Tahun 2011 (Rp)	Tahun 2010 (Rp)
Retribusi Daerah	10.977.469.958,00	9.847.526.379,00

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan baik yang bersifat pelayanan jasa umum, pelayanan jasa usaha dan perizinan tertentu.

Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2011 semula ditargetkan Rp10.745.000.000,00 setelah perubahan anggaran tahun 2011 target tersebut naik sebesar Rp680.000.000,00 atau sebesar 6,33% menjadi Rp11.425.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 mencapai Rp10.977.469.958,00 atau 96,08%, dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Daerah tidak dapat melampaui target perubahan yang ditetapkan sebesar Rp447.530.042,00 atau 3,92%.

Apabila realisasi Retribusi Daerah tahun 2011 dibandingkan dengan realisasi tahun 2010 yang jumlahnya tercatat Rp9.847.526.379,00 terlihat pendapatan Retribusi Daerah tahun 2011 meningkat sebesar Rp1.129.943.579,00 atau 11,47%.

Berikut disajikan rincian data realisasi penerimaan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2010 sebagaimana tergambar pada tabel berikut:

No	Jenis Pendapatan	Tahun Anggaran 2011			%
		Anggaran setelah perubahan (Rp)	Realisasi 2011 (Rp)	Lebih / kurang (Rp)	
1	2	3	4	5	6(5:4)
I	Retribusi jasa umum	7.820.000.000,00	7.291.605.148,00	528.394.852,00	93,2%
II	Retribusi Jasa Usaha	1.275.000.000,00	1.205.944.000,00	(69.056.000,00)	94,6%
III	Retribusi Perizinan Tertentu	2.330.000.000,00	2.479.920.810,00	149.920.810,00	106,4%
	Jumlah	11.425.000.000,00	10.977.469.958,00	(447.530.042,00)	96,1%

Penjelasan lebih lanjut mengenai rincian realisasi per jenis pelayanan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut:

a. Retribusi Jasa Umum

Subyek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum. Adapun objeknya adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2011 di anggarkan sebesar Rp7.820.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 mencapai Rp7.291.605.148,00 atau 93,24%, dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Jasa Umum tidak dapat melampaui dari target perubahan anggaran yang ditetapkan sebesar Rp528.394.852,00 atau 6,76%.

Berikut disajikan rincian realisasi penerimaan Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2011 seperti tergambar pada tabel.

No.	Jenis	Tahun 2011		%	Realisasi 2010 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi 2011 (Rp)		
I. Retribusi Jasa Umum					
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan				404.950.000,00
2	Retribusi Pelayanan Kebersihan	1.500.000.000,00	1.616.370.500,00	107,80	992.218.130,00
3	Retribusi penggantian cetak KTP	690.000.000,00	415.470.000,00	60,21	435.675.000,00
4	Retribusi Parkir	1.100.000.000,00	1.236.950.000,00	112,45	617.440.000,00
5	Retribusi Pasar	3.550.000.000,00	3.300.479.648,00	92,97	3.250.278.585,00
6	Retribusi Pengujian Kendaraan	250.000.000,00	178.205.000,00	71,28	110.895.000,00
7	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam	700.000.000,00	544.130.000,00	77,73	437.885.000,00
8	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Bahan Pengadaan	30.000.000,00	-	-	57.370.000,00
9	Retribusi Pengukuran Kapal (Pas Kecil)	-	-	-	23.700.000,00
Jumlah		7.820.000.000,00	7.291.605.148,00	93,24	6.330.411.715,00

Penjelasan lebih lanjut realisasi penerimaan Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2011 antara lain sebagai berikut:

(1) Retribusi Pelayanan Kebersihan

Akun	Tahun 2011 (Rp)	Tahun 2010 (Rp)
Retribusi Pelayanan Kebersihan	1.616.370.500,00	992.218.130,00

Retribusi Pelayanan Kebersihan Tahun Anggaran 2011 ditargetkan sebesar Rp1.500.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp1.616.370.500,00 atau 107,80%, dengan demikian terlihat realisasi retribusi ini dapat melampaui target sebesar Rp116.370.500,00 atau 7,80%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pelayanan Kebersihan Tahun Anggaran 2010 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp992.218.130,00, terlihat retribusi ini di tahun 2011 naik sebesar Rp624.152.370,00 atau 62,90%.

(2) Retribusi Penggantian Cetak KTP

Akun	Tahun 2011 (Rp)	Tahun 2010 (Rp)
Retribusi Penggantian Cetak KTP	415.470.000,00	435.675.000,00

Retribusi Penggantian Cetak KTP Tahun Anggaran 2011, ditargetkan sebesar Rp690.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 mencapai Rp415.470.000,00 atau 60,21%, dengan demikian realisasi penerimaan retribusi ini tidak dapat melampaui target sebesar Rp274.530.000,00 atau 39,79%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Penggantian Cetak KTP Tahun Anggaran 2010 yang tercatat sebesar Rp435.675.000,00, penerimaan retribusi ini di tahun 2011 turun sebesar Rp20.205.000,00 atau 4,64%.

(3) Retribusi Parkir

Akun	Tahun 2011 (Rp)	Tahun 2010 (Rp)
Retribusi Parkir	1.236.950.000,00	617.440.000,00

Retribusi Parkir Tahun Anggaran 2011, ditargetkan sebesar Rp1.100.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 mencapai Rp1.236.950.000,00 atau 112,45%, dengan demikian realisasi penerimaan retribusi ini melampaui target sebesar Rp136.950.000,00 atau 12,45%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Parkir Tahun Anggaran 2010 yang tercatat sebesar Rp617.440.000,00, penerimaan retribusi ini di tahun 2011 naik sebesar Rp619.510.000,00 atau 100,34%.

(4) Retribusi Pasar

Akun	Tahun 2011 (Rp)	Tahun 2010 (Rp)
Retribusi Pasar	3.300.479.648,00	3.250.278.585,00

Retribusi Pasar Tahun Anggaran 2011, ditargetkan sebesar Rp3.550.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 mencapai Rp3.300.479.648,00 atau 92,97 %, dengan demikian realisasi penerimaan retribusi ini tidak dapat melampaui target sebesar Rp249.520.352,00 atau 7,03%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pasar Tahun Anggaran 2010 yang tercatat sebesar Rp3.250.278.585,00, penerimaan retribusi ini di tahun 2011 naik sebesar Rp50.201.063,00 atau 1,54%.

(5) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Akun	Tahun 2011 (Rp)	Tahun 2010 (Rp)
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	178.205.000,00	110.895.000,00

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2011 ditargetkan sebesar Rp250.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 mencapai Rp178.205.000,00 atau 71,28%, dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tidak dapat mencapai target sebesar Rp71.795.000,00 atau 28,72%. Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun Anggaran 2010 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp110.895.000,00, terlihat penerimaan retribusi ini di tahun 2011 naik sebesar Rp67.310.000,00 atau 60,7%.

(6) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam

Akun	Tahun 2011 (Rp)	Tahun 2010 (Rp)
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam	544.130.000,00	439.902.489,00

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Tahun Anggaran 2011 ditargetkan sebesar Rp700.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 mencapai Rp544.130.000,00 atau 77,73%, dengan demikian realisasi penerimaan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam tidak dapat mencapai target sebesar Rp155.870.000,00 atau 22,27%. Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Tahun Anggaran 2010 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp437.885.000,00, terlihat penerimaan retribusi ini di tahun 2011 naik sebesar Rp106.245.000,00 atau 24,26%.

(7) Retribusi Pergantian Biaya Cetak

Akun	Tahun 2011 (Rp)	Tahun 2010 (Rp)
Retribusi Pelayanan Kebersihan	-	40.925.000

Retribusi Pergantian Biaya Cetak tahun anggaran 2011 ditargetkan sebesar Rp30.000.000,00. Sampai dengan akhir tahun Anggaran 2011, tidak ada realisasi yang tercapai.

b. Retribusi Jasa Usaha

Subyek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha, sedangkan yang menjadi obyeknya adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2011 ditargetkan sebesar Rp1.275.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 mencapai Rp1.205.944.000,00 atau 94,58%, dengan demikian realisasi retribusi ini tidak dapat melampaui target sebesar Rp69.056.000,00 atau 5,42%.

Realisasi penerimaan Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2011 disajikan lebih rinci pada tabel.

No	Jenis Pendapatan	Tahun Anggaran 2011		%	Realisasi 2010 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi 2011 (Rp)		
1	2	4	5	6(5:4)	7
II. Retribusi Jasa Usaha					
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	250.000.000,00	156.910.000,00	62,76	76.000.000,00
2	Retribusi Tempat Pelelangan	30.000.000,00	-	-	-
3	Retribusi Jasa Terminal	425.000.000,00	443.400.000,00	104,33	221.000.000,00
4	Retribusi Penyedotan Kakus	80.000.000,00	21.550.000,00	26,94	17.250.000,00
5	Retribusi Pemasukan Pengeluaran Hewan	-	-	-	48.710.000,00
6	Retribusi Potong Hewan	100.000.000,00	52.650.000,00	52,65	47.000.000,00
7	Retribusi Tempat Khusus Parkir	305.000.000,00	352.350.000,00	115,52	234.500.000,00
8	Retribusi Jasa Pelabuhan Laut	85.000.000,00	179.084.000,00	210,69	47.791.000,00
9	Retribusi Pemanfaatan Kayu Olahan	-	-	-	32.277.500,00
	Jumlah	1.275.000.000,00	1.205.944.000,00	94,58	724.528.500,00

Penjelasan lebih lanjut realisasi penerimaan Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2011 antara lain sebagai berikut:

(1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Akun	Tahun 2011 (Rp)	Tahun 2010 (Rp)
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	156.910.000,00	41.800.000,00

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2011, ditargetkan sebesar Rp250.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 mencapai Rp156.910.000,00 atau 62,76%, dengan demikian realisasi retribusi ini tidak dapat melampaui target sebesar Rp93.090.000,00 atau 37,24%.

Apabila realisasi Retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2010 yang tercatat sebesar Rp76.000.000,00, terlihat retribusi ini di tahun 2011 naik sebesar Rp80.910.000,00 106,46%.

Realisasi penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah bersumber dari hasil optimalisasi pemanfaatan/pemakaian kekayaan daerah yang terdapat pada beberapa unit satuan kerja.

Seperti pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan, pemakaian kendaraan/alat-alat besar milik daerah.

(2) Retribusi Pelelangan

Akun	Tahun 2011 (Rp)	Tahun 2010 (Rp)
Retribusi Pelelangan	-	-

Retribusi Pelelangan tahun anggaran 2011 ditargetkan sebesar Rp30.000.000,00. Sampai dengan akhir tahun Anggaran 2011, tidak ada realisasi yang tercapai.

(3) Retribusi Jasa Terminal

Akun	Tahun 2011 (Rp)	Tahun 2010 (Rp)
Retribusi Jasa Terminal	443.400.000,00	221.000.000,00

Retribusi Jasa Terminal Tahun Anggaran 2011, ditargetkan sebesar Rp425.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 mencapai Rp443.400.000,00 atau 104,33%, dengan demikian realisasi retribusi ini dapat melampaui target sebesar Rp18.400.000,00 atau sebesar 4,33%. Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Jasa Terminal Tahun Anggaran 2010 yang tercatat sebesar Rp221.000.000,00, terlihat realisasi retribusi ini di tahun 2011 naik sebesar Rp222.400.000,00 atau 100,63%.

(4) Retribusi Penyedotan Kakus

Akun	Tahun 2011 (Rp)	Tahun 2010 (Rp)
Retribusi Penyedotan Kakus	21.550.000,00	17.750.000,00

Retribusi Penyedotan Kakus Tahun Anggaran 2011, ditargetkan sebesar Rp80.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 mencapai Rp21.550.000,00 atau 26,94%, dengan demikian realisasi retribusi ini tidak dapat mencapai target sebesar Rp58.450.000,00 atau sebesar 73,06%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Penyedotan Kakus Tahun Anggaran 2010 yang tercatat sebesar Rp17.750.000,00, terlihat realisasi retribusi ini di tahun 2011 turun sebesar Rp4.300.000,00 atau 24,93%.

(5) Retribusi Rumah Potong Hewan

Akun	Tahun 2011 (Rp)	Tahun 2010 (Rp)
Retribusi Rumah Potong Hewan	52.650.000,00	47.000.000,00

Retribusi Rumah Potong Hewan Tahun Anggaran 2011, ditargetkan sebesar Rp100.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 mencapai Rp52.650.000,00 atau 52,65%, dengan demikian realisasi retribusi ini tidak dapat mencapai target sebesar Rp47.350.000,00 atau sebesar 47,35%. Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Rumah Potong Hewan Tahun Anggaran 2010 yang tercatat sebesar Rp47.000.000,00, terlihat realisasi retribusi ini di tahun 2011 turun sebesar Rp5.650.000,00 atau 12,02%.

(6) Retribusi Tempat Khusus Parkir

Akun	Tahun 2011 (Rp)	Tahun 2010 (Rp)
Retribusi Tempat Khusus Parkir	352.350.000,00	230.900.000,00

Retribusi Tempat Khusus Parkir Tahun Anggaran 2011, ditargetkan sebesar Rp305.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 mencapai Rp352.350.000,00 atau 115,52%, dengan demikian realisasi retribusi ini dapat melampaui target sebesar Rp47.350.000,00 atau sebesar 15,52%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Tempat Khusus Parkir Tahun Anggaran 2010 yang tercatat sebesar Rp230.900.000,00, terlihat realisasi retribusi ini di tahun 2011 naik sebesar Rp117.850.000,00 atau 50,26%.

(7) Retribusi Jasa Pelabuhan Laut

Akun	Tahun 2011 (Rp)	Tahun 2010 (Rp)
Retribusi Jasa Pelabuhan laut	179.084.000,00	47.791.000,00

Retribusi Jasa Pelabuhan Laut Tahun Anggaran 2011, ditargetkan sebesar Rp85.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 mencapai Rp179.084.000,00 atau 210,69%, dengan demikian realisasi retribusi ini dapat melampaui target sebesar Rp94.084.000,00 atau sebesar 110,69%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Jasa Pelabuhan Laut Tahun Anggaran 2010 yang tercatat sebesar Rp47.791.000,00, terlihat realisasi

retribusi ini di tahun 2011 naik sebesar Rp131.293.000,00 atau 274,72%.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Subyek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah. Sedangkan obyeknya adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana dan prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2011, ditargetkan sebesar Rp2.330.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 mencapai Rp2.485.800.810,00 atau 106,69%, dengan demikian realisasi retribusi ini melampaui target sebesar Rp155.800.810,00 atau 6,69%.

Lebih lanjut realisasi penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2011 disajikan lebih rinci pada tabel berikut:

No	Jenis Pendapatan	Tahun anggaran 2011		%	Realisasi 2010 (Rp)
		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi 2011 (Rp)		
1	2	3	4	5 (4:3)	6
II. Retribusi Perizinan Tertentu					
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	935.000.000,00	1.026.098.455,00	110,37	704.873.475,00
2	Retribusi Izin Gangguan	810.000.000,00	941.825.375,00	116,27	1.234.604.925,00
3	Retribusi Izin Trayek	100.000.000,00	24.480.000,00	24,48	33.250.000,00
4	Retribusi Izin Usaha Pariwisata	-	-	0,00	87.837.000,00
5	Retribusi Izin Rekreasi dan Hiburan Umum	205.000.000,00	205.731.000,00	100,36	87.960.000,00
6	Retribusi Izin Usaha Perdagangan	-	-	-	204.450.000,00
7	Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi	-	-	-	30.350.000,00
8	Retribusi Izin Usaha Jasa angkutan sewa	-	-	-	14.500.000,00
10	Retribusi Tanda Daftar Perusahaan	-	-	-	200.000.000,00
11	Retribusi Tanda Daftar Gudang	-	-	-	28.150.000,00
12	Retribusi Izin Perikanan	250.000.000,00	281.785.980,00	112,71	143.189.775,00
13	Retribusi Izin Angkutan Barang	-	-	-	32.950.000,00
14	Retribusi Tanda Daftar Industri	-	-	-	2.250.000,00
15	Retribusi Surat Izin Usaha Industri	-	-	-	250.000,00
16	Retribusi Tera/tera Ulang	30.000.000,00	-	-	-
Jumlah		2.330.000.000,00	2.479.920.810,00	106,69	2.804.615.175,00

Penjelasan lebih lanjut realisasi penerimaan Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2011 antara lain sebagai berikut:

(1) Retribusi Izin Gangguan

Akun	Tahun 2011 (Rp)	Tahun 2010 (Rp)
Retribusi Izin Gangguan	941.825.375,00	1.234.604.925,00

Retribusi Izin Gangguan Tahun Anggaran 2011, ditargetkan sebesar Rp810.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 mencapai Rp941.825.375,00 atau 116,27%, dengan demikian realisasi penerimaan retribusi ini melampaui target sebesar Rp131.825.375,00 atau 16,27%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Izin Gangguan Tahun Anggaran 2010 yang

tercatat sebesar Rp1.234.604.925,00 retribusi ini di tahun 2011 mengalami penurunan sebesar Rp292.779.550,00 atau 23.71%.

(2) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Akun	Tahun 2011 (Rp)	Tahun 2010 (Rp)
Retribusi IMB	1.026.098.455,00	704.873.475,00

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Tahun Anggaran 2011, ditargetkan sebesar Rp935.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 mencapai Rp1.026.098.455,00 atau 109,74%, dengan demikian realisasi penerimaan retribusi ini melampaui target sebesar Rp91.098.455,00 atau 9,74%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Tahun Anggaran 2010 yang tercatat sebesar Rp704.873.475,00 retribusi ini di tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar Rp327.104.980,00 atau 45,57%.

(3) Retribusi Izin Trayek

Akun	Tahun 2011 (Rp)	Tahun 2010 (Rp)
Retribusi Izin Trayek	24.480.000,00	33.250.000,00

Retribusi Izin Trayek Tahun Anggaran 2011, ditargetkan sebesar Rp100.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp24.480.000,00 atau 24,48%, dengan demikian retribusi izin trayek tidak mencapai target sebesar Rp75.520.000,00 atau 75,52%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Izin Usaha Perdagangan Tahun Anggaran 2010 yang tercatat sebesar Rp33.250.000,00, terlihat mengalami penurunan di tahun 2011 sebesar Rp8.770.000,00 atau 26,38%.

(4) Retribusi Izin Usaha Rekreasi & Hiburan Umum

Akun	Tahun 2011 (Rp)	Tahun 2010 (Rp)
Retribusi Izin Usaha Rekreasi & Hiburan Umum	205.731.000,00	89.945.000,00

Retribusi Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum Tahun Anggaran 2011, ditargetkan sebesar Rp205.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp205.731.000,00 atau 100,36%, dengan demikian terjadi pelampauan target sebesar Rp731.000,00 atau 0,36%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Tanda Daftar Perusahaan Tahun Anggaran

2010 yang tercatat sebesar Rp89.945.000,00, terlihat mengalami kenaikan di tahun 2011 sebesar Rp117.771.000,00 133.89%.

(5) Retribusi Izin Perikanan

Akun	Tahun 2011 (Rp)	Tahun 2010 (Rp)
Retribusi Izin Perikanan	281.785.980,00	176.189.775,00

Retribusi Izin Perikanan Tahun Anggaran 2011, ditargetkan sebesar Rp250.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp281.785.980,00 atau 112,71%, dengan demikian terjadi pelampauan target sebesar Rp31.785.980,00 atau 12,71%.

Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Izin Perikanan Tahun Anggaran 2010 yang tercatat sebesar Rp176.189.775,00, terlihat mengalami kenaikan di tahun 2011 sebesar Rp138.596.205,00 atau 96,79%.

(6) Retribusi Tera-tera Ulang

Akun	Tahun 2011 (Rp)	Tahun 2010 (Rp)
Retribusi Tera/ Tera Ulang	-	-

Retribusi Tera-tera Ulang tahun anggaran 2011 ditargetkan sebesar Rp30.000.000,00. Sampai dengan akhir tahun Anggaran 2011, tidak ada realisasi yang tercapai.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Akun	Tahun 2011 (Rp)	Tahun 2010 (Rp)
Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan	263.772.207,00	304.761.759,00

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2011, ditetapkan sebesar Rp500.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp263.772.207,00 atau 52,75%, dengan demikian realisasi penerimaan tersebut Tidak dapat mencapai target sebesar Rp236.227.793,00 atau 47,25%.

Apabila realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2011 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2010 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp304.761.759,00 terlihat pendapatan di tahun 2011 terjadi penurunan sebesar Rp40.989.552,00 atau 13,45%. Pendapatan ini seluruhnya merupakan pembagian laba atas penyertaan modal pada Bank Pembangunan daerah Maluku.

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kelompok penerimaan Lain-lain PAD merupakan komponen penerimaan yang tidak termasuk pada kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah,

Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

Lain-lain PAD Tahun Anggaran 2011, ditargetkan sebesar Rp5.775.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 mencapai Rp4.599.022.727,00 atau 79,63%, dengan demikian realisasi penerimaan Lain-Lain PAD tidak dapat mencapai target sebesar Rp 1.175.977.273,00 atau 20,36%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Lain-Lain PAD Tahun Anggaran 2010 yang tercatat sebesar Rp3.103.690.738,00, terlihat pendapatan di tahun 2011 naik sebesar Rp1.495.331.989,00 atau 48,17%. Realisasi penerimaan Lain-lain PAD Tahun Anggaran 2011, digambarkan pada tabel berikut:

No	Uraian	Tahun Anggaran 2011		%	Realisasi 2010 (Rp)
		Anggaran setelah Perubahan (Rp)	Realisasi 2011 (Rp)		
1	2	4	5	6	7
1	Sumbangan Pihak Ketiga	3.000.000.000,00	2.564.295.581,00	85,48	2.664.992.774,00
2	Bunga Jasa Giro	400.000.000,00	260.182.902,00	65,05	159.539.807,00
3	Bunga Deposito	400.000.000,00	323.823.226,00	80,96	35.671.230,00
4	Penerimaan Lainnya	1.625.000.000,00	1.384.904.518,00	85,22	1.406.520.491,00
5	Penjualan Hasil Peternakan	350.000.000,00	65.816.500,00	18,80	0,00
Jumlah		5.775.000.000,00	4.599.022.727,00	79,64	4.266.724.302,00

Penjelasan lebih lanjut realisasi Penerimaan Lain-lain PAD Tahun Anggaran 2011, antara lain sebagai berikut:

a. Sumbangan Pihak Ketiga

Akun	Tahun 2011 (Rp)	Tahun 2010 (Rp)
Sumbangan Pihak ketiga	2.564.295.581,00	2.664.992.774,00

Sumbangan Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2011, semula ditargetkan sebesar Rp3.000.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 Rp2.564.295.581,00 atau 85,48%. Realisasi penerimaan ini tidak dapat mencapai target sebesar Rp435.704.419,00 atau 14,52%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Sumbangan Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2010 yang tercatat sebesar Rp2.664.992.774,00, penerimaan di tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar Rp100.697.193,00 atau 3,78%.

Dari nilai sebesar Rp2.564.295.581,00 diperoleh dari potongan SP2D sebesar Rp1.671.662.637,00.

b. Bunga Jasa Giro

Akun	Tahun 2011 (Rp)	Tahun 2010 (Rp)
Bunga Jasa Giro	260.182.902,00	141.711.762,00

Bunga Jasa Giro Tahun Anggaran 2011 ditargetkan sebesar Rp400.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 mencapai Rp260.182.902,00 atau 65,05%, dengan demikian realisasi Bunga Jasa Giro tidak dapat mencapai target sebesar Rp139.817.098,00 atau 34,95%.

c. Bunga Deposito

Akun	Tahun 2011 (Rp)	Tahun 2010 (Rp)
Bunga Deposito	323.823.226,00	-

Bunga Deposito Tahun Anggaran 2011, ditargetkan Rp400.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 mencapai Rp323.823.226,00 atau 80,96%, dengan demikian realisasi Bunga Deposito Tidak dapat mencapai target sebesar Rp76.176.774,00 atau 19,04%. disebabkan oleh turunnya tingkat suku bunga Bank.

d. Penerimaan Lainnya

Akun	Tahun 2011 (Rp)	Tahun 2010 (Rp)
Penerimaan Lainnya	1.384.904.518,00	573.958.367,00

Penerimaan Lainnya terealisasi sebesar Rp1.384.904.518,00 atau 85,22% dari target sebesar Rp1.625.000.000,00. Dengan demikian realisasi penerimaan lainnya tidak dapat mencapai target sebesar Rp240.095.482,00 atau 14,78%

e. Penerimaan penjualan hasil Peternakan

Akun	Tahun 2011 (Rp)	Tahun 2010 (Rp)
Penerimaan Penjualan Hasil Peternakan	65.816.500,00	-

Penerimaan Penjualan hasil peternakan terealisasi sebesar Rp65.816.500,00. atau 18,80% dari target sebesar Rp350.000.000,00. Dengan demikian realisasi penerimaan lainnya tidak dapat mencapai target sebesar Rp284.183.500,00 atau 81,20%

5.1.1.2 Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan)

Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2011 ditargetkan sebesar Rp504.149.031.800,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 mencapai Rp493.702.871.653,00 atau 97,93%, dengan demikian di tahun 2011 realisasi Pendapatan Transfer tidak mencapai target sebesar Rp10.446.160.147,00 atau 2,07%.

Apabila realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2011 dibandingkan dengan realisasi tahun 2010 yang tercatat sebesar Rp417.075.237.962,00 realisasi Pendapatan Transfer di tahun 2011 naik sebesar

Rp76.627.633.691,00 atau 18,37%. Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2011 disajikan pada tabel berikut:

No.	Uraian	Anggaran perubahan (Rp)	Realisasi 2011 (Rp)	%	Realisasi 2010 (Rp)
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	406.929.540.000,00	394.183.708.114,00	96,87	362.346.090.819,00
1.1	Bagi Hasil Pajak	52.009.000.000,00	42.799.147.368,00	82,29	49.407.570.701,00
a	Pajak Bumi dan Bangunan	40.009.000.000,00	33.744.486.107,00	84,34	31.039.883.308,00
b	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	-	-	-	5.339.692.137,00
c	Pajak Penghasilan	12.000.000.000,00	9.054.661.261,00	75,46	13.027.996.256,00
1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	11.377.000.000,00	8.001.804.746,00	70,33	6.999.851.118,00
a	PSDH	2.609.000.000,00	319.031.272,00	12,23	714.906.191,00
b	Royalti	8.605.000.000,00	7.421.725.232,00	86,25	6.151.610.416,00
c	Perikanan	163.000.000,00	261.048.242,00	160,15	133.334.511,00
1.3	Dana Alokasi Umum	314.020.640.000,00	313.861.356.000,00	99,95	281.284.868.000,00
1.4	Dana Alokasi Khusus	29.522.900.000,00	29.521.400.000,00	99,99	24.653.800.000,00
2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	81.509.491.800,00	85.416.616.880,00	104,79	43.866.312.800,00
2.1	Dana Penyesuaian	81.509.491.800,00	85.416.616.880,00	104,79	43.866.312.800,00
3	Transfer Pemerintah Provinsi	15.710.000.000,00	14.102.546.659,00	89,77	10.877.688.648,00
3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	15.710.000.000,00	14.102.546.659,00	89,77	10.877.688.648,00
a	Bagi Hasil dari PKB	11.900.000.000,00	10.456.183.699,00	87,87	877.777.713,00
b	Bagi Hasil dari BBNKB	1.985.000.000,00	1.668.968.036,00	84,08	897.650.437,00
c	Bagi Hasil dari PBBKB	1.725.000.000,00	1.946.643.484,00	112,85	9.050.325.364,00
d	Bagi Hasil dari Pajak ABT	-	-	-	37.080.829,00
e	Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	100.000.000,00	30.751.440,00	30,75	14.854.305,00
	Jumlah	504.149.031.800,00	493.702.871.653,00	97,93	417.075.237.962,00

Penjelasan lebih lanjut realisasi penerimaan bagian daerah dari Pendapatan Transfer, Tahun 2011 sebagai berikut:

1. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan a. Bagi Hasil Pajak

Akun	Tahun 2011 (Rp)	Tahun 2010 (Rp)
Bagi Hasil Pajak	42.799.147.368,00	49.407.570.501,00

Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2011 ditargetkan sebesar Rp52.009.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 mencapai Rp42.799.147.368,00 atau 82,29%, dengan demikian tahun 2011 penerimaan Bagi Hasil Pajak tidak mencapai target sebesar Rp9.209.852.632,00 atau 17,71%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Bagi Hasil Pajak tahun 2010 yang tercatat Rp49.407.570.701,00, penerimaan Bagi Hasil Pajak di Tahun 2011 naik sebesar Rp6.608.423.333,00 atau 13,38%.

Realisasi penerimaan Bagi Hasil Pajak terdiri dari:

(1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Akun	Tahun 2011 (Rp)	Tahun 2010 (Rp)
Pajak Bumi Bangunan	33.744.486.107,00	31.039.883.308,00

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun Anggaran 2011 ditargetkan Rp40.009.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 mencapai sebesar Rp33.744.486.107,00 atau 84,34%, dengan demikian realisasi Pajak Bumi dan Bangunan tidak mencapai target sebesar Rp6.264.513.893,00 atau 15,66%.

Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi penerimaan Tahun Anggaran 2010 yang tercatat sebesar Rp31.039.883.308,00 penerimaan bagi hasil PBB di tahun 2011 naik sebesar Rp2.704.602.799,00 atau 8,71%.

(2) Pajak Penghasilan (PPh)

Akun	Tahun 2011 (Rp)	Tahun 2010 (Rp)
Pajak Penghasilan	9.054.661.261,00	13.027.996.256,00

PPh Tahun Anggaran 2011 ditargetkan sebesar Rp12.000.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp9.054.661.261,00 atau 75,46%, dengan demikian tahun 2011 tidak mencapai target sebesar Rp2.945.338.739,00 atau 24,54%.

Apabila realisasi penerimaan PPh tahun 2011 dibandingkan dengan realisasi tahun 2010 yang tercatat sebesar Rp13.027.996.256,00, realisasi PPh di tahun 2011 turun sebesar Rp3.973.334.995,00 atau 30,50%.

b. Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam (SDA)

Akun	Tahun 2011 (Rp)	Tahun 2010 (Rp)
Bagi Hasil Bukan Pajak	8.001.804.746,00	6.999.851.118,00

Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA Tahun Anggaran 2011 ditargetkan Rp11.377.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 mencapai Rp8.001.804.746,00 atau 70,33%, dengan demikian realisasi penerimaan tidak mencapai target sebesar Rp3.375.195.254,00 atau 29,67%.

Apabila total realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA tahun 2011 sebesar Rp8.001.804.746,00 dibandingkan dengan total realisasi tahun 2010 yang tercatat Rp6.999.851.118,00, maka di tahun 2011 naik sebesar Rp1.001.953.628,00 atau 14,31%.

Realisasi Penerimaan Bagian Daerah atas Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA tahun 2011 bersumber dari:

(1) PSDH sebesar Rp319.031.272,00

Akun	Tahun 2011 (Rp)	Tahun 2010 (Rp)
PSDH	319.031.272,00	714.906.191,00

Bagi Hasil SDA dari PSDH Tahun Anggaran 2011 semula ditargetkan sebesar Rp2.609.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 mencapai Rp319.031.272,00 atau 12,23%, dengan demikian penerimaan Bagi Hasil SDA dari PSDH tidak mencapai target sebesar Rp2.289.968.728,00 atau 87,77%.

(2) Royalti sebesar Rp7.421.725.232,00

Akun	Tahun 2011 (Rp)	Tahun 2010 (Rp)
Royalti	7.421.725.232,00	6.151.610.416,00

Penerimaan Royalti Tahun Anggaran 2011 ditargetkan sebesar Rp8.605.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 mencapai Rp7.421.725.232,00 atau 86,25%, dengan demikian penerimaan dari Royalti tidak mencapai target sebesar Rp1.183.274.768,00 atau 13,75%.

(3) Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan sebesar Rp261.048.242,00

Akun	Tahun 2011 (Rp)	Tahun 2010 (Rp)
Perikanan	261.048.242,00	133.334.511,00

Bagi Hasil SDA dari Pungutan Hasil Perikanan Tahun Anggaran 2011 ditargetkan sebesar Rp163.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 mencapai Rp261.048.242,00 atau 160,15%, dengan demikian penerimaan Bagi Hasil SDA dari Pungutan Hasil Perikanan melampaui target sebesar Rp98.048.242,00 atau 60,15%.

c. Dana Alokasi Umum

Akun	Tahun 2011 (Rp)	Tahun 2010 (Rp)
Dana Alokasi Umum	313.861.356.000,00	281.284.868.000,00

Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2011 dianggarkan sebesar Rp314.020.640.000,00 dan realisasi sampai akhir tahun 2011 sebesar

Rp313.861.356.000,00 atau 99,95%. Realisasi tersebut tidak mencapai target sebesar Rp159.284.000,00 atau 0,05%.

d. Dana Alokasi Khusus

Akun	Tahun 2011 (Rp)	Tahun 2010 (Rp)
Dana Alokasi Khusus	29.521.400.000,00	24.653.800.000,00

Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011 dianggarkan sebesar Rp29.522.900.000,00 dan realisasi sampai akhir tahun 2011 sebesar Rp29.521.400.000,00 atau 99,99%. Realisasi tersebut tidak mencapai target sebesar Rp1.500.000,00 atau 0,01%.

**2. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya
Dana Penyesuaian**

Akun	Tahun 2011 (Rp)	Tahun 2010 (Rp)
Dana Penyesuaian	85.416.616.880,00	10.862.834.343,00

Dana Penyesuaian Tahun Anggaran 2011 dianggarkan sebesar Rp81.509.491.800,00 dan realisasi sampai akhir tahun 2011 sebesar Rp85.416.616.880,00 atau 104,79%. Realisasi tersebut melampaui target sebesar Rp3.907.125.080,00 atau 4,79%.

3. Pendapatan Transfer dari Pemerintah Provinsi

Akun	Tahun 2011 (Rp)	Tahun 2010 (Rp)
Pendapatan Transfer dari Pemerintah Provinsi	14.102.546.659,00	10.862.834.343,00

Pendapatan Transfer dari Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2011 dianggarkan sebesar Rp15.710.000.000,00 dan realisasi sampai akhir tahun 2011 sebesar Rp14.102.546.659,00 atau 89,77%. Realisasi tersebut tidak mencapai target sebesar Rp1.607.453.341,00 atau 10,23%. Adapun rincian Pendapatan Transfer dari Pemerintah Provinsi adalah sebagai berikut:

(1) Bagi Hasil dari PKB

Akun	Tahun 2011 (Rp)	Tahun 2010 (Rp)
Bagi Hasil PKB	10.456.183.699,00	877.777.713,00

Bagi Hasil dari PKB Tahun Anggaran 2011 dianggarkan sebesar Rp11.900.000.000,00 dan realisasi sampai akhir tahun 2011 sebesar Rp10.456.183.699,00 atau 87,87%. Realisasi tersebut tidak mencapai target sebesar Rp1.443.816.301,00 atau 12,13%.

(2) Bagi Hasil dari BBNKB

Akun	Tahun 2011 (Rp)	Tahun 2010 (Rp)
Bagi Hasil BBNKB	1.668.968.036,00	897.650.437,00

Bagi Hasil dari BBNKB Tahun Anggaran 2011 dianggarkan sebesar Rp1.985.000.000,00 dan realisasi sampai akhir tahun 2011 sebesar Rp1.668.968.036,00 atau 84,08%. Realisasi tersebut tidak mencapai target sebesar Rp316.031.964,00 atau 15,92%.

(3) Bagi Hasil dari PBBKB

Akun	Tahun 2011 (Rp)	Tahun 2010 (Rp)
Bagi Hasil PBBKB	1.946.643.484,00	9.050.325.364,00

Bagi Hasil dari PBBKB Tahun Anggaran 2011 dianggarkan sebesar Rp1.725.000.000,00 dan realisasi sampai akhir tahun 2011 sebesar Rp1.946.643.484,00 atau 112,85%. Realisasi tersebut melampaui target sebesar Rp221.643.484,00 atau 12,85%.

(4) Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan

Akun	Tahun 2011 (Rp)	Tahun 2010 (Rp)
ABT & air Permukaan	30.751.440,00	37.080.829,00

Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Tahun Anggaran 2011 dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00 dan realisasi sampai akhir tahun 2011 sebesar Rp30.751.440,00 atau 30,75%. Realisasi tersebut tidak mencapai target sebesar Rp69.248.560,00 atau 69,25%.

5.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun Anggaran 2011 sampai dengan ditetapkannya perubahan anggaran tahun 2011 dianggarkan sebesar Rp1.260.000.000,00. Dan terealisasi sebesar Rp2.060.555.547,89 atau 163,54%, Lain-lain Pendapatan yang sah Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

No	Jenis Pendapatan	Tahun Anggaran 2011	
		Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2011 (Rp)
1	2	4	5
I	Pendapatan Hibah	1.260.000.000,00	1.932.377.641,89
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah		299.975.000,00
2	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri		1.632.402.641,89
II	Penerimaan Lainnya		128.177.906,00
	Penerimaan Lainnya / TASPEN		128.177.906,00
	Jumlah	1.260.000.000,00	2.060.555.547,89

5.1.2 Belanja Daerah

Akun	Tahun 2011 (Rp)	Tahun 2010 (Rp)
Belanja Daerah	531.953.502.503,00	454.843.014.632,00

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dan diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah.

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran Daerah dari rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Ekuitas Dana Lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu Tahun Anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 ditargetkan sebesar Rp564.136.838.942,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun 2011 sebesar Rp531.953.442.503,00 atau 94,30%, sehingga sisa anggaran di tahun 2011 yang tidak dapat diserap sebesar Rp32.183.396.439,00 atau 5,70%.

Selanjutnya apabila realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 tersebut dibandingkan dengan realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 yang tercatat sebesar Rp454.843.014.632,00 terlihat peningkatan/kenaikan realisasi belanja di tahun 2011 sebesar Rp77.110.427.871,00 atau 16,95%.

Rincian realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 tergambar pada tabel berikut:

No	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2011 (Rp)	%	Realisasi 2010 (Rp)
1	2	3	4	5 (4:3)	6
	JENIS BELANJA				
I	Belanja Operasi	443.036.075.411,00	432.987.470.468,00	97,73	353.604.112.994,00
1	Belanja Pegawai	328.896.826.025,00	324.603.284.220,00	98,69	259.647.323.399,00
2	Belanja Barang	101.319.424.386,00	95.467.534.328,00	94,22	75.010.001.747,00
3	Belanja Hibah	4.921.325.000,00	5.051.843.750,00	102,65	12.770.343.188,00
4	Belanja Bantuan Sosial	7.898.500.000,00	7.864.808.170,00	99,57	6.176.444.660,00
II	Belanja Modal	117.350.763.531,00	94.165.997.035,00	80,24	100.569.236.838,00
1	Belanja Tanah	7.081.500.000,00	6.567.358.000,00	92,74	3.085.923.938,00
2	Belanja Peralatan dan mesin	18.405.360.981,00	15.223.790.809,00	82,71	15.997.831.896,00
3	Belanja Gedung dan Bangunan	25.735.984.550,00	21.096.159.765,00	81,97	29.451.379.467,00
4	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	63.240.538.000,00	50.425.461.261,00	79,74	48.422.537.364,00
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	2.887.380.000,00	853.227.200,00	29,55	3.300.291.078,00
6	Belanja Aset Lainnya				311.273.095,00
III	Belanja Tak Terduga	3.750.000.000,00	4.799.975.000,00	128,00	669.664.800,00
1	Belanja Tak Terduga	3.750.000.000,00	4.799.975.000,00	128,00	669.664.800,00
	Jumlah (I,II dan III)	564.136.838.942,00	531.953.442.503,00	94,30	454.843.014.632,00

Penjelasan lebih lanjut mengenai Belanja Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

5.1.2.1 Belanja Daerah menurut Klasifikasi Ekonomi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Belanja Daerah di klasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi yaitu pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan aktivitas. Klasifikasi ekonomi berdasarkan jenis belanja untuk Pemerintah Daerah terdiri dari Belanja Operasi meliputi

Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial, serta Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga.

Realisasi Belanja menurut Klasifikasi Ekonomi (jenis belanja) Tahun Anggaran 2011, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

Akun	Tahun 2011 (Rp)	Tahun 2010 (Rp)
Belanja Operasi	432.987.470.468,00	353.604.112.994,00

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial.

Belanja Operasi Tahun Anggaran 2011 diproyeksikan Rp443.036.075.411,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 mencapai Rp432.987.470.468,00 atau 97,74%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak dapat diserap sebesar Rp10.048.604.943 atau 2,27%.

Atas saldo belanja daerah sebesar Rp432.987.470.468,00 tersebut termasuk di dalamnya pelampauan anggaran pada 15 SKPD Senilai Rp727.600.227,00.

Penjelasan lebih lanjut realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2011 adalah sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Akun	Tahun 2011 (Rp)	Tahun 2010 (Rp)
Belanja Pegawai	324.603.284.220,00	259.647.323.399,00

Belanja Pegawai, merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penghasilan lainnya diberikan untuk peningkatan kesejahteraan dengan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2011 diproyeksikan sebesar Rp328.896.826.025,00. Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp324.603.284.220,00 atau 98,69%, dari realisasi tersebut, sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp4.293.541.805,00 atau 1,31%.

Rincian belanja pegawai tahun 2011 adalah sebagai berikut:

Deskripsi	Nilai (Rp)
Belanja Pegawai Tidak Langsung	
- Belanja Gaji dan Tunjangan	255.948.937.156,00
- Belanja Tambahan Penghasilan	14.306.522.500,00
- Belanja Penerimaan Lain DPRD & Kpl Daerah	1.040.760.000,00

Deskripsi	Nilai (Rp)
- Biaya Pungut Pajak Daerah	2.759.709.394,00
	-
Belanja Pegawai Langsung	-
- Honorarium PNS	15.520.192.600,00
- Honorarium Non PNS	33.186.523.070,00
- Uang Lembur	913.418.000,00
- Kursus / Pelatihan	749.721.500,00
- Pengobatan	177.500.000,00
TOTAL	324.603.284.220,00

Dari realisasi sebesar Rp324.603.284.220,00 digunakan untuk:

- 1) Biaya pemungutan PBB sektor pertambangan sebesar Rp880.000.000,00 diberikan sebagai tambahan penghasilan;
- 2) Pengeluaran untuk biaya operasional PBB sebesar Rp240.000.000,00 belum dipertanggungjawabkan;
- 3) Realisasi pembayaran tunjangan perumahan DPRD melampaui anggaran sebesar Rp42.000.000,00.

b. Belanja Barang

Akun	Tahun 2011 (Rp)	Tahun 2010 (Rp)
Belanja Barang	95.467.534.328,00	75.010.001.747,00

Belanja Barang digunakan untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai guna memproduksi barang dan jasa. Belanja Barang Tahun Anggaran 2011 ditargetkan sebesar Rp101.319.424.386,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 mencapai sebesar Rp95.467.534.328,00 atau 94,22%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak dapat diserap sebesar Rp5.851.890.058,00 atau 5,75%.

Rincian belanja barang dan jasa tahun 2011 adalah sebagai berikut:

No.	Deskripsi	Nilai (Rp)
1	Belanja Bahan Pakai Habis	6.326.105.729,00
2	Belanja Bahan / Material	14.333.677.600,00
3	Belanja Jasa Kantor	9.507.500.304,00
4	Belanja Premi Asuransi	1.282.242.309,00
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.565.879.256,00
6	Belanja Cetak Dan Penggandaan	6.144.338.360,00
7	Belanja Sewa Rumah/Gedung	3.030.882.875,00
8	Belanja Sewa Mobilitas	274.645.000,00
9	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	399.670.000,00
10	Belanja Makan dan Minum	8.501.847.863,00
11	Belanja Pakaian Dinas	662.025.000,00
12	Belanja Pakaian Kerja	403.654.267,00

No.	Deskripsi	Nilai (Rp)
13	Belanja Pakaian Khusus dan Hari Hari Tertentu	936.720.000,00
14	Belanja Perjalanan Dinas	29.107.624.590,00
15	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	791.700.000,00
16	Belanja Kursus Pelatihan Sosialisasi	1.690.763.000,00
17	Belanja Pemeliharaan	2.982.231.025,00
18	Belanja Jasa Konsultasi	4.526.027.150,00
	Jumlah	95.467.534.328,00

Dari realisasi sebesar Rp95.489.735.468,00 digunakan untuk biaya perjalanan dinas luar daerah pada Sekretariat Daerah sebesar Rp274.305.000,00 dan Sekretariat DPRD sebesar Rp1.855.340.000,00 tidak ditemukan dalam manifest penerbangan.

c. Belanja Hibah

Akun	Tahun 2011 (Rp)	Tahun 2010 (Rp)
Belanja Hibah	5.051.843.750,00	12.770.343.188,00

Belanja Hibah digunakan untuk pemberian hibah dalam bantuan uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya atau kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja Hibah Tahun Anggaran 2011 semula diproyeksikan sebesar Rp4.921.325.000,00. Realisasi Belanja Hibah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp5.051.843.750,00 atau 102,65%, adapun sisa anggaran yang Melampaui sebesar Rp130.518.750,00 atau 2,65%. Pelampauan anggaran terjadi karena pelampauan dana BOS kepada sekolah swasta. Realisasi belanja hibah tahun 2011 terdiri dari:

No.	Deskripsi	Nilai (Rp)
1	PT.Citra Gamalama	93.600.000,00
2	PKK kota Ternate	600.000.000,00
3	Dharma Wanita Kota Ternate	300.000.000,00
4	Pramuka	400.000.000,00
5	Korpri	300.000.000,00
6	Koni Kota Ternate	250.000.000,00
7	PMI	200.000.000,00
8	Mesjid Al Munawar	75.000.000,00
9	Bantuan Operasional Sekolah	2.833.243.750,00
	Jumlah	5.051.843.750,00

Realisasi belanja hibah diantaranya digunakan untuk:

- 1) Belanja hibah yang tidak disertai naskah perjanjian hibah yang benar;

- 2) Belanja hibah tidak dipertanggungjawabkan sebesar Rp718.096.784,00 dan terdapat sisa dana hibah yang belum disetorkan ke kas daerah sebesar Rp112.230.550,00.

d. Belanja Bantuan Sosial

Akun	Tahun 2011 (Rp)	Tahun 2010 (Rp)
Belanja Bantuan Sosial	7.864.808.170,00	6.176.444.660,00

Belanja ini digunakan untuk pemberian dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2011 diproyeksikan sebesar Rp7.898.500.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp7.864.808.170,00 atau 99,57%, sedangkan sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp33.691.830,00 atau 0,43%. Bantuan Sosial ini diberikan kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Organisasi Sosial Keagamaan, Partai Politik dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD).

Realisasi belanja bantuan sosial tahun 2011 terdiri dari:

No.	Deskripsi	Nilai (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial Organisasi Sosial Kemasyarakatan	6.344.722.350,00
2	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	999.346.700,00
3	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	520.739.120,00
	Jumlah	7.864.808.170,00

Dari belanja bantuan sebesar Rp7.864.808.170,00 digunakan untuk pengeluaran HUT Kota Ternate Tahun 2010 sebesar Rp430.000.000,00.

2. Belanja Modal

Akun	Tahun 2011 (Rp)	Tahun 2010 (Rp)
Belanja Modal	94.165.997.035,00	100.569.236.838,00

Belanja Modal digunakan untuk pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Belanja Modal Tahun Anggaran 2011 ditargetkan sebesar Rp117.350.763.531,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp94.165.997.035,00 atau 80,24%, dengan demikian tahun 2011, sisa anggaran Belanja Modal yang tidak dapat diserap sebesar Rp23.184.766.496,00 atau 19,75%.

Rincian lebih lanjut realisasi Belanja Modal dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Belanja Tanah

Akun	Tahun 2011 (Rp)	Tahun 2010 (Rp)
Belanja Tanah	6.567.358.000,00	3.085.923.938,00

Belanja Tanah Tahun Anggaran 2011 ditargetkan sebesar Rp7.081.500.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp6.567.358.000,00 atau 92,74% dan sisa anggaran yang tidak dapat diserap sebesar Rp514.142.000,00 atau 7,26%. Belanja sebesar Rp6.567.358.000,00 merupakan belanja tanah kantor.

b. Belanja Peralatan dan Mesin

Akun	Tahun 2011 (Rp)	Tahun 2010 (Rp)
Belanja Peralatan dan Mesin	15.223.790.809,00	15.997.831.896,00

Belanja Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2011 di targetkan sebesar Rp18.405.360.981,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp15.223.790.809,00 atau 82,71% dan sisa anggaran yang tidak dapat diserap sebesar Rp3.181.570.172,00 atau 17,28%.

Rincian belanja peralatan dan mesin adalah sebagai berikut:

No.	Deskripsi	Nilai (Rp)
1	Belanja Modal Alat Berat	152.725.850,00
2	Belanja Modal Alat Angkut Darat Bermotor	5.257.609.000,00
3	Belanja Modal Alat angkut Darat tidak Bermotor	-
4	Belanja Modal Alat Angkut Air Bermotor	119.196.000,00
5	Belanja Modal Alat Angkut Air Tidak Bermotor	472.220.000,00
6	Belanja Modal Alat angkut Udara	-
7	Belanja Modal Alat Bengkel	434.580.338,00
8	Belanja Modal Alat Pengolahan Pertanian	294.311.750,00
9	Belanja Modal Peralatan Kantor	572.745.758,00
10	Belanja Modal Perlengkapan Kantor	1.047.492.105,00
11	Belanja Modal Komputer	2.233.858.703,00
12	Belanja Modal Mebulair	1.360.400.919,00
13	Belanja Modal Alat Dapur	25.257.542,00
14	Belanja Modal Penghias rumah tangga	175.900.000,00
15	Belanja Modal alat studio	491.792.344,00
16	Belanja Modal Alat Komunikasi	3.343.500,00
17	Belanja Modal Alat Ukur	29.390.000,00
18	Belanja Modal alat Kedokteran	317.125.000,00
19	Belanja Modal Alat Laboratorium	2.235.842.000,00
	Jumlah	15.223.790.809,00

c. Belanja Gedung dan Bangunan

Akun	Tahun 2011 (Rp)	Tahun 2010 (Rp)
Belanja Gedung & Bangunan	21.096.159.765,00	29.451.379.467,00

Belanja Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2011 semula ditargetkan sebesar Rp25.735.984.550,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 mencapai Rp21.096.159.765,00 atau 81,97%, dan sisa anggaran yang tidak dapat diserap sebesar Rp4.639.824.785,00 atau 18,03%.

d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Akun	Tahun 2011 (Rp)	Tahun 2010 (Rp)
Belanja Jalan, irigasi & Jaringan	50.425.461.261,00	48.422.537.364,00

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2011 ditargetkan sebesar Rp63.240.538.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 mencapai sebesar Rp50.425.461.261,00 atau 79,74%, dan sisa anggaran yang tidak dapat diserap adalah sebesar Rp12.815.076.739,00 atau 20,26%.

Rincian belanja jalan, irigasi dan jaringan adalah sebagai berikut:

No.	Deskripsi	Nilai (Rp)
1	Belanja Modal Jalan	41.968.829.442,00
2	Belanja Modal Jembatan	1.624.761.000,00
3	Belanja Modal Jaringan Air	4.561.149.819,00
4	Belanja Modal Penerangan Jalan, Taman, Hutan Kota	1.622.701.000,00
5	Belanja Modal Instalasi Listrik.telpon	648.020.000,00
	Jumlah	50.425.461.261,00

e. Belanja Aset Tetap Lainnya

Akun	Tahun 2011 (Rp)	Tahun 2010 (Rp)
Belanja Aset tetap lainnya	853.227.200,00	3.300.291.078,00

Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2011 ditargetkan sebesar Rp2.887.380.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 mencapai sebesar Rp853.227.200,00 atau 29,55%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak dapat diserap sebesar Rp2.034.152.800,00 atau 70,45%.

Rincian belanja jalan, irigasi dan jaringan adalah sebagai berikut:

No.	Deskripsi	Nilai (Rp)
1	Belanja Modal Buku / Kepustakaan	618.067.200,00
2	Belanja Modal Barang bercorak kesenian	-
3	Belanja Modal Hewan ternak / Tanaman	235.160.000,00
	Jumlah	853.227.200,00

3. Belanja Tidak Terduga

Akun	Tahun 2011 (Rp)	Tahun 2010 (Rp)
Belanja Tidak Terduga	4.799.975.000,00	669.664.800,00

Belanja Tidak Terduga digunakan untuk penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya. Disamping itu digunakan dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2011 di targetkan sebesar Rp3.750.000.000,00. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 belanja ini terealisasi sebesar Rp4.799.975.000,00 atau 128%. Realisasi belanja tak terduga yang melebihi nilai anggarannya karena adanya pengeluaran untuk menanggulangi bencana meletusnya Gunung Gamalama pada bulan Desember 2011.

Rincian belanja tidak terduga tahun 2011 adalah sebagai berikut:

No.	Deskripsi	Nilai (Rp)
1	Penanganan Pasca Bencana	4.709.147.000,00
2	Penanggulangan Masalah Kesehatan	90.828.000,00
	Jumlah	4.799.975.000,00

Dari belanja sebesar Rp4.799.975.000,00 digunakan untuk:

- 1) Realisasi belanja tidak terduga yang ditetapkan pada Tahun 2010 sebesar Rp28.000.000,00;
- 2) Realisasi belanja tidak terduga tidak menggunakan SP2D sebesar Rp299.975.000,00;
- 3) Realisasi belanja tidak terduga sebesar Rp551.137.000,00 belum dipertanggungjawabkan.

5.1.3 Pembiayaan Daerah

Realisasi Pembiayaan Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2011 dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan

Akun	Tahun 2011 (Rp)	Tahun 2010 (Rp)
Penerimaan Pembiayaan	6.827.669.057,00	2.871.609.770,00

Realisasi Penerimaan Pembiayaan diperoleh dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun yang lalu yaitu Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp6.827.669.057,00

Penerimaan Pembiayaan berupa penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp21.781.738.083,00 tidak terealisasi karena sampai akhir tahun 2011 Pemerintah Kota Ternate belum mendapatkan pinjaman.

5.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan

Akun	Tahun 2011 (Rp)	Tahun 2010 (Rp)
Pengeluaran Pembiayaan	2.097.000.000,00	-

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp2.097.000.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp2.097.000.000,00. Seluruh pengeluaran pembiayaan tersebut merupakan penyertaan modal yang terdiri dari:

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Penyertaan Modal ke BPR Syariah	1.800.000.000,00
2	Penyertaan Modal PD Citra Gamalama	297.000.000,00
	Jumlah	2.097.000.000,00

5.1.4 Aset

5.1.4.1 Aset Lancar

Akun	Per 31 Desember 2011 (Rp)	Per 31 Desember 2010 (Rp)
Aset Lancar	10.522.517.173,00	15.950.812.116,00

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika aset tersebut:

- Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal badan/unit; atau
- Dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca; atau
- Berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi.
- Aset yang tidak termasuk kategori tersebut diatas diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

1. Kas dan Setara Kas

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp3.893.229.280,89 dan sebesar Rp6.730.455.459,00. sedangkan saldo di Kas di Kas Daerah menurut Rekening Bank BUD adalah sebesar Rp3.893.448.671,00 sebagaimana dalam rincian dibawah ini:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	- BPD Maluku Rek 0601022001	1.676.971.113,69
2	- BPD Maluku Rek 0601002014	1.000.000,20
3	- BNI Rek 0086130053	2.215.328.167,00
	Jumlah	3.893.299.280,89

2. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp803.072.742,00 dan sebesar Rp355.436.628,00. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan hasil konsolidasi dari seluruh saldo Kas di Bendahara Pengeleluaran dari 40 SKPD sebagaimana dijabarkan pada tabel dibawah ini:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Dinas Pendidikan	244.723.087,00
2	Sanggar Kegiatan Belajar	1.007.684,00
3	Dinas Kesehatan	3.809.612,00
4	Dinas Pekerjaan Umum	2.039.916,00
5	Kantor Pemadam	1.245.927,00
6	Dinas Tata Kota	1.000.498,00
7	Bappeda	18.663.426,00
8	Dinas Perhubungan	5.982.897,00
9	Dinas Kebersihan	2.472.479,00
10	Lingkungan Hidup	15.886.738,00
11	Dinas Catatan Sipil	112.055.606,00
12	Kantor Pemberdayaan Perempuan	1.632.949,00
13	Kantor Keluarga Berencana	71.317.801,00
14	Dinas Tenaga Kerja	1.118.706,00
15	Dinas Koperasi dan UKM	972.196,00
16	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1.063.362,00
17	Dispora	1.633.635,00
18	Satpol PP	2.536.887,00
19	Kesbang Linmas	713.465,00
20	Sekretariat Daerah	179.029.745,00
21	Sekretariat DPRD	2.356.243,00
22	DPPKAD	7.361.594,00
23	Inspektorat	999.996,00
24	Kec. Ternate Utara	6.318.843,00
25	Kec. Ternate Selatan	65.652.116,00
26	Kec. Pulau Ternate	2.565.731,00
27	Kec. Moti	6.205.077,00
28	Kec. Ternate Tengah	687.612,00
29	Kec. Batang Dua	1.022.375,00
30	Kec. Hiri	19.926.462,00
31	BPBD	2.523.284,00
32	BKD	1.000.000,00
33	Badan Pemberdayaan Masyarakat	1.015.748,00
34	Kantor Arsip	1.416.034,00
35	Kominfo	2.446.649,00
36	Dinas Pertanian	1.197.271,00
37	BP4K	1.430.376,00
38	Dinas Perikanan dan Kelautan	3.375.896,00
39	Dinas Pasar	1.602.530,00
40	Dinas Perindag	5.062.289,00
JUMLAH		803.072.742,00

Bank Pembangunan Maluku yang merupakan tempat menyimpan Kas Bendahara Pengeluaran SKPD mensyaratkan saldo minimal yang harus ada di rekening Bendahara Pengeluaran SKPD adalah Rp1.000.000,00. Sehingga pada akhir tahun dipastikan tidak semua sisa Kas di Bendahara Pengeluaran bisa disetor ke Kas Daerah.

Saldo kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp803.072.742,00 termasuk didalamnya:

- 1) Kekurangan kas pada Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Kecamatan Ternate Selatan sebesar Rp377.279.114,02;
- 2) Penyalahgunaan kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp387.205.419,00;
- 3) Penggunaan kas belum dipertanggungjawabkan bendahara pengeluaran pada Badan Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana sebesar Rp70.109.141,97;
- 4) Terdapat realisasi belanja tahun 2011 yang digunakan untuk kegiatan tahun 2012 sebesar Rp154.915.845,00
- 5) Saldo Kas di bendahara pengeluaran tahun 2010 belum disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp148.005.553,00;
- 6) Terdapat perbedaan antara saldo kas pada CaLK dengan register penutupan kas SKPD.

Dari nilai kas di kas daerah dan kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp4.696.372.022,89 (Rp3.893.229.280,89+Rp803.072.742,00) berbeda dengan SiLPA di LRA sebesar Rp(141.234.425,11) dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Hutang PFK	Rp4.835.722.596,00
2) Pendapatan ditangguhkan pada kas di bendahara pengeluaran	Rp1.883.852,00
TOTAL	Rp4.837.606.448,00
3) Kas di Kas Daerah dan Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp4.696.372.022,89
4) SiLPA	Rp(141.234.425,11)

3. Piutang Pajak

Piutang Pajak per 31 Desember 2011 sebesar Rp3.297.382.225,00 dan saldo per 31 Desember 2010 sebesar Rp4.537.461.915,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Per 31 Desember 2011 (Rp)	Per 31 Desember 2010 (Rp)
1	Pajak Hotel	-	97.412.615,00
2	Pajak Restoran	92.268.044,00	102.268.044,00
3	Pajak Reklame	-	3.292.500,00
4	Pajak Penerangan Jalan	1.241.684.465,00	2.371.059.040,00
5	Pajak Galian Gol C	1.963.429.716,00	1.963.429.716,00
	Jumlah	3.297.382.225,00	4.537.461.915,00

Piutang pajak per 31 Desember 2011 tersebut merupakan saldo piutang pajak per 31 Desember 2010 yang masih belum tertagih sampai dengan akhir tahun 2011. Tidak ada penambahan piutang ditahun 2011 karena seluruh Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang terbit tahun 2011 telah dilunasi oleh wajib pajak.

4. Piutang Retribusi

Piutang Retribusi per 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp0,00 dan sebesar Rp59.922.100,00 dengan rincian sebagai berikut:

Akun	Per 31 Desember 2011 (Rp)	Per 31 Desember 2010 (Rp)
Piutang Retribusi Ayam Petelur	-	59.922.100,00

Saldo piutang retribusi ayam petelur per 31 Desember 2010 seluruhnya sudah dilunasi pada tahun 2011. Pada tahun 2011 pendapatan retribusi ayam petelur tidak lagi dianggarkan oleh Pemerintah Kota Ternate.

5. Piutang Dana Bagi Hasil

Piutang Dana Bagi Hasil per 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp1.113.351.755,00 dan Rp937.216.883,00 dengan rincian sebagai berikut:

Akun	Per 31 Desember 2011 (Rp)	Per 31 Desember 2010 (Rp)
BP-PBB	-	579.656.993,00
PPh-Pasal 21	357.559.890,00	357.559.890,00
Dana Transfer Provinsi	755.791.865,00	-
Jumlah	1.113.351.755,00	937.216.883,00

Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan saldo awal sebesar Rp579.656.993,00 seluruhnya telah dilunasi oleh pemerintah pusat pada tahun 2011. Sedangkan Piutang Dana Bagi Hasil PPh 21 sebesar Rp357.559.890,00 belum dilunasi oleh pemerintah pusat. Sampai saat ini Pemerintah Kota Ternate belum mendapatkan konfirmasi dari pemerintah pusat mengenai status piutang tersebut. Untuk Dana Transfer Provinsi sebesar Rp.755.791.865,00 terdiri dari PKB sebesar Rp.446.088.575 dan BBN-KB Rp. 309.703.290,00.

6. Piutang Lainnya

Akun	Per 31 Desember 2011 (Rp)	Per 31 Desember 2010 (Rp)
Piutang lainnya	-	1.301.282.831,00

Piutang Lainnya per 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp0,00 dan sebesar Rp1.301.282.831,00. Saldo per 31 Desember 2010 didapat dari bagi hasil pajak provinsi yang belum diterima oleh Pemerintah Kota Ternate per 31 Desember 2010 dan saldo tersebut telah dilunasi pada tahun 2011. Untuk tahun 2011 ini seluruh pendapatan

transfer dari Provinsi telah diterima oleh Pemerintah Kota Ternate sehingga tidak ada piutang diakhir 2011.

7. Persediaan

Akun	Per 31 Desember 2011 (Rp)	Per 31 Desember 2010 (Rp)
Persediaan	1.415.411.169,00	2.029.036.300,00

Persediaan per 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp1.415.411.169,00 dan Rp2.029.036.300,00. Nilai persediaan tersebut mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan.

Nilai persediaan ini merupakan akumulasi jumlah persediaan yang tercatat pada Neraca SKPD berdasarkan hasil pemeriksaan fisik barang. berikut rincian nilai persediaan di masing-masing SKPD:

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Sanggar Kegiatan Belajar	410.000,00
2	Dinas Kesehatan	1.192.859.394,00
3	Dinas PU	603.600,00
4	Kantor Pemadam Kebakaran	237.500,00
5	Bappeda	680.000,00
6	Dinas Kebersihan	705.000,00
7	Pemberdayaan Perempuan	68.700,00
8	Dinas Tenaga Kerja	324.100,00
9	Dinas Tata Kota	-
10	Kesbang Linmas	287.200,00
11	Setwan	1.310.300,00
12	DPPKAD	215.289.250,00
13	Inspektorat	1.475.000,00
14	Kantor Arsip	1.071.125,00
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	92.000,00
	Jumlah	1.415.413.169,00

5.1.4.2 Investasi Jangka Panjang

Akun	Per 31 Desember 2011 (Rp)	Per 31 Desember 2010 (Rp)
Investasi Jangka Panjang	15.176.972.463,00	10.738.272.265,00

Investasi Jangka Panjang (penyertaan modal) per 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp15.176.972.463,00 dan Rp10.738.272.265,43 terdiri dari:

1. Investasi Nonpermanen – Dana Bergulir

Akun	Per 31 Desember 2011 (Rp)	Per 31 Desember 2010 (Rp)
Investasi Nonpermanen	960.604.200,00	3.106.000.000,00

Investasi Non Permanen (Dana bergulir) adalah dana yang disalurkan pemerintah dalam rangka penguatan permodalan koperasi, usaha kecil dan menengah. Dana tersebut disalurkan oleh Pemerintah Kota Ternate melalui anggaran pengeluaran pembiayaan. Saldo awal per 31 Desember 2010 Investasi Non Permanen (Dana Bergulir) adalah sebesar Rp3.106.000.000. saldo tersebut diperoleh dari proses pencairan pengeluaran pembiayaan selama tahun 2002 sampai dengan 2010 dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Realisasi (Rp)
2002	435.900.000,00
2003	727.500.000,00
2004	487.600.000,00
2005	365.000.000,00
2006	400.000.000,00
2007	-
2008	300.000.000,00
2009	390.000.000,00
2010	-
2011	-
Jumlah	3.106.000.000,00

Sejak tahun 2010 pemerintah belum menambah investasinya lagi. Dana Bergulir ini seluruhnya diserahkan kepada pengelola dana bergulir. Rincian dana berdasarkan pengelola dana bergulir adalah sebagai berikut:

Pengelola Dan Bergulir	Nilai (Rp)
BRI	435.900.000,00
KSU Makugawene	2.470.100.000,00
ISAP	20.000.000,00
BKCSK/PKK	150.000.000,00
LEPP-M3	30.000.000,00
Jumlah	3.106.000.000,00

Untuk melaksanakan rekomendasi dari BPK atas laporan audit tahun 2010, Tahun 2011 ini Pemerintah Kota Ternate melakukan penyesuaian terhadap saldo awal diatas dengan mencatat saldo Investasi Non Permanen Lainnya (Dana Bergulir) pada Laporan 2011 ini pada nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net reliazable value*).

Sebagaimana dinyatakan dalam Buletin Teknis SAP Nomor 7 tentang akuntansi dana bergulir nilai bersih yang dapat direalisasikan diperoleh dari harga perolehan dikurangi Dana Bergulir Diragukan Tertagih dan ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir. Masih dalam Buletin Teknis tersebut dinyatakan Dana Bergulir Diragukan Tertagih nilainya dapat kita peroleh melalui penatausahaan dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya (*aging schedule*).

Untuk menentukan jatuh tempo dana bergulir yang tidak tertagih Pemerintah Kota Ternate mengacu pada Laporan Perkembangan Dana Bergulir dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang disampaikan melalui surat Nomor 518/229/KUKM-KT/X/2011. Dalam laporan tersebut dinyatakan penentuan jatuh tempo piutang berpedoman

kepada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No 14/Per/M.UKM/II/2009 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No 20/Per/M.UKM/II/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam yang menyatakan beberapa kategori piutang sebagai berikut:

1. Piutang Macet yaitu pinjaman yang telah jatuh tempo lebih dari satu bulan dari waktu jatuh tempo dan belum dilunasi, serta tidak memiliki ikatan jaminan.
2. Piutang Diragukan yaitu pinjaman yang telah jatuh tempo lebih dari satu bulan dari waktu jatuh tempo dan belum dilunasi, tetapi memiliki ikatan jaminan.
3. Piutang Kurang Lancar, yaitu pinjaman belum jatuh tempo, menunggak angsuran pinjaman selama 3 bulan.
4. Piutang lancar yaitu pinjaman belum jatuh tempo dan lancar dalam pembayaran angsurannya.

Kategori piutang sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri tersebut digunakan oleh Pemerintah Kota Ternate melalui Dinas Koperasi dan UKM untuk menentukan penyelesaian piutang yang didanai melalui dana bergulir ini. Berdasarkan kategori tersebut dapat dilaporkan kondisi piutang pada masing-masing pengelola dana bergulir sebagai berikut:

No	Pengelola Dana Bergulir	Nilai (Rp)	Piutang			
			Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
1	BRI	435.900.000,00	-	-	238.500.000,00	152.000.000,00
2	KSU Makugawene	2.470.100.000,00	532.946.000,00	187.124.000,00	589.692.000,00	944.217.800,00
3	ISAP	20.000.000,00	-	-	-	20.000.000,00
4	BKCSK/PKK	150.000.000,00	117.418.614,00	-	-	50.000.000,00
5	LEPP-M3	30.000.000,00	-	-	30.000.000,00	-
	Jumlah	3.106.000.000,00	650.364.614,00	187.124.000,00	858.192.000,00	1.166.217.800,00

Berdasarkan klasifikasi diatas maka dilakukan perhitungan dana bergulir diragukan tidak tertagih sebesar Rp1.903.423.800,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Alokasi Tidak Tertagih	Nilai Piutang (Rp)	Dana Bergulir Diragukan Tidak Tertagih (Rp)
1	Piutang Kurang Lancar	50%	187.124.000,00	93.562.000,00
2	Piutang Diragukan	75%	858.192.000,00	643.644.000,00
3	Piutang Macet	100%	1.166.217.800,00	1.166.217.800,00
				1.903.423.800,00

Berdasarkan keterangan tersebut diatas maka saldo Investasi Non Permanen (Dana Bergulir) per 31 Desember 2011 sebagaimana adalah:

Uraian	Nilai (Rp)
Investasi Dana Bergulir	3.106.000.000
Dana Bergulir Diragukan Tertagih	(1.903.423.800)
Nilai Realisasi Bersih	1.202.576.200

2. Investasi Permanen

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah daerah dapat membentuk perusahaan daerah yang asetnya dikelola secara terpisah. Pada pembentukan perusahaan daerah pemerintah menyetorkan modal tertentu dan hal tersebut dinyatakan dalam akte pendirian perusahaan. Penyertaan modal pemerintah menggambarkan jumlah yang dibayar oleh pemerintah untuk penyertaan modal dalam perusahaan 4.

Nilai penyertaan modal pemerintah daerah dapat diketahui dari Peraturan Daerah, akte pendirian perusahaan beserta perubahannya, dan bukti setoran modal yang telah dilakukan oleh pemerintah. Untuk pencatatan dengan metode ekuitas, nilai penyertaan modal pemerintah daerah dihitung dari nilai ekuitas yang ada pada laporan keuangan perusahaan bersangkutan yang telah diaudit dikalikan dengan persentase kepemilikan, namun perusahaan-perusahaan yang kepemilikan Pemerintah Kota Ternate mencapai 51% keatas sampai tahun 2011 ini hanya bisa memberikan laporan keuangan yang belum diaudit.

Nilai Investasi Permanen per 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp14.216.368.263,10 dan Rp7.632.272.265,43 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Per 31 Desember 2011 (Rp)	Per 31 Desember 2010 (Rp)
1	PT Bank BPD Maluku	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
2	PD Citra Gamalama	1.312.396.722,00	1.650.000.000,00
3	PDAM	9.103.971.541,10	3.982.272.265,43
4	BPR Syariah	1.800.000.000,00	-
	Jumlah	14.216.368.263,10	7.632.272.265,43

PT Bank BPD Maluku

Investasi berupa penyertaan Modal kepada PT Bank Maluku terdiri atas 400 lembar saham PT Bank Maluku (No. A BM. 0016501 s.d 0016900) dengan rincian penyertaan modal sebagai berikut:

No	Penyertaan Modal PT BPDM	Nilai (Rp)
1	Sampai dengan 2005	500.000.000,00
2	Penambahan Tahun 2006	500.000.000,00
3	Penambahan Tahun 2007	500.000.000,00
4	Penambahan Tahun 2009	500.000.000,00
	Jumlah	2.000.000.000,00

Berdasarkan penyertaan modal tersebut kepemilikan Pemerintah Kota Ternate pada PT Bank Maluku kurang dari 20% dan Pemerintah Kota Ternate tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Mengacu kepada Peraturan Walikota Ternate tentang Kebijakan Akuntansi kepemilikan kurang dari 20% harus dicatat menggunakan metode biaya dimana nilai investasi dicatat sebesar nilai perolehan. Sehingga Nilai Investasi pada PT Bank Maluku adalah sebesar Rp2.000.000.000,00 yaitu sebesar nilai perolehannya.

PD Citra Gamalama

Kepemilikan Pemerintah Kota Ternate terhadap PD Citra Gamalama adalah sebesar 100% dimana nilai penyertaan modal yang telah disetorkan oleh Pemerintah Kota Ternate sampai dengan tahun 2011 adalah sebesar Rp1.947.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Penyertaan Modal PD Citra Gamalama	Nilai (Rp)
1	Sampai dengan 2005	750.000.000,00
2	Penambahan Tahun 2006	250.000.000,00
3	Penambahan Tahun 2008	500.000.000,00
4	Penambahan Tahun 2009	150.000.000,00
5	Penambahan Tahun 2011	297.000.000,00
6	Kerugian s/d 2011	(634.603.278,00)
	Jumlah	1.312.396.722,00

Seusai dengan Peraturan Walikota Ternate tentang Kebijakan Akuntansi kepemilikan lebih dari 50% harus menggunakan metode ekuitas dalam penilaian investasi. Dengan menggunakan metode ekuitas investasi PD Citra Gamalama dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi Pemerintah Kota Ternate.

Pencatatan penyertaan modal PD Citra Gamalama sebesar Rp1.312.396.722,00 tidak didasarkan kepada laporan keuangan yang telah diaudit.

Sampai Laporan Keuangan ini dibuat PD Citra Gamalam belum memberikan Laporan Keuangan Per 31 Desember 2011 sehingga Pemerintah Kota Ternate belum bisa mencatat berdasarkan metode ekuitas.

PDAM

Persentase Kepemilikan Pemerintah Kota Ternate terhadap PDAM adalah sebesar 88,76% angka ini didapat dari Penyertaan Pemerintah Kota Ternate sebesar Rp20.157.691.254,00 (Penyertaan Modal Pemerintah sebesar Rp18.983.801.100,00 ditambah saldo awal pada saat pengalihan sebesar Rp1.173.890.154,00) dibagi dengan total penyertaan modal pemerintah sebesar Rp22.709.635.254,00 jumlah penyertaan modal tersebut didapat dari Neraca PDAM Per 31 Desember 2011 yang belum diaudit.

Seperti yang sudah disampaikan diatas kepemilikan diatas 50% harus menggunakan metode ekuitas dalam penilaian investasi. Dengan menggunakan metode ekuitas investasi PDAM dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi Pemerintah Kota Ternate. Berdasarkan hal tersebut maka nilai Investasi Pemerintah Kota Ternate per 31 Desember 2011 adalah Rp9.103.971.541,10 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Penyertaan Pemerintah Kota Ternate	18.983.801.100,00
2	Modal Awal Pada saat Kepemilikan	1.173.890.154,00
3	Jumlah Kepemilikan	20.157.691.254,00
4	Persentase kepemilikan	88,76%
5	Saldo Rugi Tahun Lalu	(15.456.120.252,58)
6	Bagian Pemerintah Kota Ternate dari Saldo Rugi Tahun lalu (4x5)	(13.718.852.336,19)
7	Laba Tahun Berjalan	3.002.628.011,82
8	Bagian Pemerintah Kota Ternate dari Laba Tahun Berjalan (4x7)	2.665.132.623,29
9	Nilai Investasi Pemerintah Kota Ternate pada PDAM (3+6+8)	9.103.971.541,10

Sumber: Neraca PDAM Per 31 Desember 2011 *Unaudited*

Penyertaan modal pada PDAM Kota Ternate sebesar Rp9.103.971.541,10 tersebut belum didukung bukti-bukti transaksi yang memadai dan tidak didasarkan pada laporan keuangan yang telah diaudit.

BPR Syariah

Pada tahun 2011 ini menanamkan modal kepada BPR Syariah melalui pengeluaran pembiayaan sebesar Rp1.800.000.000,00, dengan rincian SP2D sebagai berikut:

Tanggal	No SP2D	Nilai (Rp)
11-Mar-11	01044/2011	500.000.000,00
1-Jul-11	03517/2011	100.000.000,00
6-Jul-11	03624/2011	32.000.000,00
13-Oct-11	09038/2011	68.000.000,00
21-Nov-11	09992/2011	200.000.000,00
9-Dec-11	10636/2011	900.000.000,00
	Jumlah	1.800.000.000,00

BPR Syariah didirikan berdasarkan akta notaris nomor 48 tanggal 27 Desember 2011 yang diterbitkan oleh Notaris Tatiek Nurdjanti, S.H. Dalam akta tersebut dinyatakan nama lengkap perusahaan ini adalah PT Bank Pengkreditan Rakyat Syariah Bahari Berkesan atau disingkat PT BPRS Bahari Berkesan. kepemilikan Pemerintah Kota Ternate atas perusahaan ini diatas 50% sehingga harus mencatat dengan metode ekuitas. Tetapi perusahaan milik daerah ini baru akan beroperasi di tahun 2012 sehingga belum ada penyesuaian dalam nilai investasi yang tercantum di Neraca Pemerintah Kota Ternate per 31 Desember 2011.

5.1.4.3 Aset Tetap

Aset Tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk keperluan operasional maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Aset Tetap diklasifikasikan ke dalam enam bidang/golongan termasuk Konstruksi Dalam Pengerjaan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp1.544.800.182.967,00 dan Rp941.595.674.146,57, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Per 31 Desember 2011 (Rp)	Per 31 Desember 2010 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
1	Tanah	Rp 212.443.105.462,00	Rp 39.046.622.794,00	Rp 173.396.482.668,00
2	Peralatan dan Mesin	Rp 121.362.341.989,00	Rp 129.047.654.055,38	(Rp7.685.312.066,38)
3	Gedung dan Bangunan	Rp 704.692.234.441,00	Rp 304.752.765.020,00	Rp399.939.469.421,00
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Rp 442.835.824.558,00	Rp 378.435.177.808,71	Rp64.400.646.749,29
5	Aset Tetap Lainnya	Rp 11.005.162.016,00	Rp 14.057.208.468,48	(Rp3.052.046.452,48)
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp 35.947.301.230,00	Rp 76.256.246.000,00	(40.308.944.770,00)
	Jumlah	Rp 1.528.285.969.696,00	Rp 941.595.674.146,57	Rp 586.690.295.549,43

Kenaikan atau penurunan aset tetap merupakan mutasi bersih dari aset tetap selama 2011. Kenaikan aset disebabkan oleh belanja modal di tahun 2011 atau karena hasil dari penilaian ulang atas aset tetap tahun 2011. Penurunan aset tetap karena adanya aset yang sudah tidak terpakai dan sudah keluar SK penghapusannya dan juga karena penilaian ulang atas aset tetap tahun 2011 yang pengaruhnya mengurangi nilai aset tersebut.

Dalam saldo aset tetap tersebut termasuk didalamnya selisih antara mutasi aset dengan realisasi belanja modal sebesar Rp517.356.971.477,43 dengan penjelasan sebagai berikut:

a) Belanja Modal 2011	Rp94.165.997.035,00
b) Aset Tetap 2011	Rp1.553.118.642.659,00
c) Aset Tetap 2010	<u>Rp941.595.674.146,57</u>
	<u>Rp611.522.968.512,43</u>
	Selisih Rp517.356.971.477,43

Hal tersebut terjadi karena adanya penilaian sendiri dari Bidang Aset DPKAD;

5.1.4.3.1 Aset Tetap Tanah

Aset tetap tanah merupakan aset tetap tanah kantor. Aset tetap tanah per 31 Desember 2011 sebesar Rp212.443.105.462,00 terdapat didalamnya tanah yang tidak didukung bukti kepemilikan sebesar Rp183.081.144.511,00 dan dua bidang tanah tidak diketahui harga perolehannya.

5.1.4.3.2 Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2011 sebesar Rp121.362.341.989,00 terdiri dari:

No.	Deskripsi	Nilai (Rp)
1	Alat Berat	7.080.315.264,00
2	Alat Angkut Darat Bermotor	44.852.225.611,00
3	Alat angkut Darat tidak Bermotor	-
4	Alat Angkut Air Bermotor	2.570.839.900,00
5	Alat Angkut Air Tidak Bermotor	510.342.451,00

No.	Deskripsi	Nilai (Rp)
6	Alat angkut Udara	-
7	Alat Bengkel	3.560.458.224,00
8	Alat Pengolahan Pertanian	1.639.385.767,00
9	Peralatan Kantor	10.250.902.555,00
10	Perlengkapan Kantor	3.326.187.169,00
11	Komputer	12.422.492.005,00
12	Mebulair	6.104.326.136,00
13	Alat Dapur	1.905.393.585,00
14	Penghias Rumah Tangga	2.002.017.830,00
15	Alat Studio	3.327.316.842,00
16	Alat Komunikasi	1.304.776.696,00
17	Alat Ukur	209.061.448,00
18	Alat Kedokteran	6.744.913.511,00
19	Alat Laboratorium	10.167.694.995,00
20	Alat Keamanan	3.383.692.000,00
	Jumlah	121.362.341.989,00

Atas aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp121.362.341.989,00 terdapat didalamnya kendaraan yang tidak didukung bukti kepemilikan sebesar Rp24.877.896.142,50 dan sebanyak 12 kendaraan tidak diketahui harga perolehannya.

5.1.4.3.3 Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2011 sebesar Rp704.692.234.441,00 terdiri dari:

No.	Deskripsi	Nilai (Rp)
1	Gedung Kantor	338.333.811.459,00
2	Rumah Jabatan	5.811.633.000,00
3	Rumah Dinas	335.844.712.608,00
4	Bangunan Gudang	13.029.545.890,00
5	Bangunan Bersejarah	667.329.982,00
6	Monumen	352.000.000,00
7	Tugu Peringatan	978.944.000,00
8	Bangunan lainnya	9.674.257.502,00
	Jumlah	704.692.234.441,00

5.1.4.3.4 Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset tetap jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2011 sebesar Rp121.362.341.989,00 terdiri dari:

No.	Deskripsi	Nilai (Rp)
1	Jalan	242.683.456.508,00
2	Jembatan	151.336.548.318,00
3	Jaringan Air	12.606.264.614,00
4	Penerangan Jalan,Taman,Hutan Kota	29.129.957.398,00

No.	Deskripsi	Nilai (Rp)
5	Instalasi Listrik.telpon	7.079.597.720,00
	Jumlah	442.835.824.558,00

5.1.4.3.5 Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya per 31 Desember 2011 sebesar Rp11.005.162.016,00 terdiri dari:

No.	Deskripsi	Nilai (Rp)
1	Buku & Kepustakaan	10.549.297.851,00
2	Barang Kesenian	343.233.165,00
3	Hewan Ternak	112.631.000,00
	Jumlah	11.005.162.016,00

1.1.4.3.1 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2011 sebesar Rp35.947.301.230,00 terdiri dari:

No	Deskripsi	Nilai (Rp)
1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
	Pasar Tradisional Thp I	1.178.000.000,00
	Pasar Tradisional Thp II	315.000.000,00
	Pasar Tradisional Thp III	984.770.000,00
2	Dinas Pendidikan Nasional	
	Pembangunan Kantor UPTD Diknas Tengah	299.500.000,00
	Pembangunan Kantor UPTD Ternate Pulau (Lanj.)	221.825.000,00
	Perencanaan Teknis Pemb. Kantor UPTD Ternate Pulau	10.000.000,00
	Pengawasan Teknis Pemb. Kantor UPTD Ternate Pulau	6.000.000,00
	Kantor Dinas	999.000.000,00
	Perencanaan dan Pengawasan Kantor Dinas dan UPTD Diknas Tengah	92.500.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum	
	Fasilitas Umum/Gelanggang Remaja Tahap I	1.339.200.000,00
	Perencanaan Fasilitas Umum/Gelanggang Remaja Tahap I	81.424.000,00
	Pengawasan Fasilitas Umum/Gelanggang Remaja Tahap I	44.000.000,00
	Fasilitas Umum/Gelanggang Remaja Tahap II	700.000.000,00
	Fasilitas Umum/Gelanggang Remaja Tahap III	150.000.000,00
	Survey dan Investigasi Pemb. Jalan Pantai Kota baru Bastiong	122.000.000,00
	Jalan Pantai Kota Baru Bastiong Tahap I	4.459.610.400,00
	Perencanaan Jalan Pantai Kota Baru Bastiong I	199.800.000,00
	Pengawasan Jalan Pantai Kota Baru Bastiong I	149.500.000,00
	Jalan Pantai Kota Baru Bastiong Tahap I (DIPD-L)	4.103.389.600,00
	Jalan Pantai Kota Baru Bastiong Tahap II	1.060.200.000,00
	Perencanaan Jalan Pantai Kota Baru Bastiong Tahap II	179.500.000,00
	Pengawasan Jalan Pantai Kota Baru Bastiong Tahap II	98.425.000,00
	Jalan Pantai Kota Baru Bastiong Tahap II (DIPD-L)	2.659.800.000,00
	Jalan Pantai Kota Baru Bastiong Tahap III	2.768.186.000,00
	Jalan Pantai Kota Baru Bastiong Tahap III (DIPD-L)	6.931.814.000,00
	Jalan Pantai Kota Baru Bastiong Tahap IV (MY)	300.000.000,00
	Jalan Kelurahan Makassar Timur (DIPD-L)	307.122.460,00
	Pembangunan Pasar Rakyat Moderen Hygienis	5.295.534.770,00
4	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
	Pembangunan Museum dan taman budaya daerah	891.200.000,00
	Jumlah	35.947.301.230,00

5.1.4.4 Aset Lainnya

Akun	Per 31 Desember 2011 (Rp)	Per 31 Desember 2010 (Rp)
Aset Lainnya	24.832.672.963,00	-

Saldo aset lainnya pada Neraca per 31 Desember 2011 sebesar Rp24.832.672.963,00 merupakan nilai dari pemindahan aset tetap yang sudah dinyatakan tidak terpakai lagi senilai Rp8.318.459.692,00 dan Aset Tetap yang diserahkan kepada sekolah swasta sebesar Rp16.514.213.271,00. Aset lain-lain sebesar Rp8.318.459.692,00 tidak ada bukti pendukungnya.

5.1.5 Kewajiban

Akun	Per 31 Desember 2011 (Rp)	Per 31 Desember 2010 (Rp)
Kewajiban	24.771.433.659,00	242.823.028,00

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2011 sebesar Rp24.771.604.103,00 seluruhnya merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Sedangkan Kewajiban per 31 Desember 2010 sebesar Rp242.823.028,00, yang seluruhnya juga merupakan kewajiban jangka pendek.

Penjelasan lebih lanjut Kewajiban Jangka Pendek adalah sebagai berikut:

5.1.5.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp24.771.604.103,00 dan Rp242.823.028,00, terdiri dari:

No	Uraian	Per 31 Desember 2011 (Rp)	Per 31 Desember 2010 (Rp)
1	Utang PFK	4.835.722.596,00	242.823.028,00
2	Utang Belanja	19.935.881.507,00	-
	Jumlah	24.771.604.103,00	242.823.028,00

Penjelasan lebih lanjut saldo Kewajiban Jangka Pendek adalah sebagai berikut:

1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Merupakan Utang Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Iuran Akses, Taspen, dan Taperum. Kewajiban Jangka Pendek berupa utang PFK per 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp4.835.722.596,00 dan Rp242.823.028,00 terdiri dari:

No	Uraian	Per 31 Desember 2011 (Rp)	Per 31 Desember 2010 (Rp)
	BUD		
1	PFK dari SP2D LS Barang Jasa	4.828.342.255,00	244.336.007,00
2	PFK dari SP2D LS Gaji dan Tunjangan	174,00	594.030,00
	Jumlah PFK BUD	4.828.342.429,00	244.930.037,00
	SKPD		
1	Dinas Pendidikan	(2.650.000,00)	(2.650.000,00)
2	Dinas Pariwisata	454.545,00	454.545,00
3	DPPKAD	4.190.678,00	-
4	Kecamatan Ternate Utara	5.296.498,00	-
5	Kecamatan Pulau Ternate	(82.000,00)	(82.000,00)
6	Kantor Infokom	170.446,00	170.446,00
	Jumlah PFK SKPD	7.380.167,00	(2.107.009,00)
	JUMLAH	4.835.722.596,00	242.823.028,00

Saldo Utang PFK per 31 Desember 2011 dari SP2D LS Barang Jasa sebesar Rp4.828.342.255,00 merupakan pemotongan pajak pada SP2D barang dan jasa yang belum disetor ke kantor pajak. Saldo tersebut terdiri dari Saldo Per 31 Desember 2010 yang belum disetor sampai akhir 2011 sebesar Rp95.148.859,00 dan dari pemotongan SP2D yang terbit tahun 2011 dan belum disetor sampai akhir 2011 sebesar Rp4.733.193.396,00.

Saldo Utang PFK 31 Desember 2011 dari SP2D LS Gaji dan Tunjangan sebesar Rp174,00 saldo ini terjadi karena adanya perbedaan pembulatan antara pajak yang dipotong dengan pajak yang disetorkan.

Utang PFK di SKPD sebesar Rp7.380.167,00 merupakan pajak yang dipotong pada saat belanja menggunakan UP/GU/TU yang sampai akhir tahun 2011 belum disetorkan ke kantor pajak.

2. Utang Belanja

Merupakan Utang Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga atas belanja daerah tahun 2011 namun dicairkan pada tahun 2012 sebanyak 59 SP2D senilai Rp19.935.881.507,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	SKPD	Jumlah SP2D	Nilai Belanja Barang (Rp)	Nilai Belanja Modal (Rp)
1	Badan Pemberdayaan Masyarakat	2	32.100.000,00	-
2	Badan Penanggulangan Bencana	1		7.000.000,00
3	Dinas kebudayaan dan Pariwisata	1	119.880.000,00	
4	Dinas Kesehatan	1	61.025.000,00	
5	Dinas Pekerjaan Umum	16		12.727.598.057,00
6	Dinas Pendidikan Nasional	32		6.764.623.950,00
7	Dinas Tata Kota dan Pertamanan	2		151.304.500,00
8	Sekretariat Daerah	4	62.450.000,00	9.900.000,00
	Jumlah	59	275.455.000,00	19.660.426.507,00

5.1.6 Ekuitas Dana

Akun	Per 31 Desember 2011 (Rp)	Per 31 Desember 2010 (Rp)
Ekuitas Dana	1.554.046.698.636,00	968.041.935.500,00

Saldo Ekuitas Dana per 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp.1.554.046.698.636,00 dan Rp968.041.935.500,00.

5.1.6.1 Ekuitas Dana Lancar

Saldo Ekuitas Dana Lancar per 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing sebesar (Rp14.259.966.537,11) dan Rp15.727.110.815,00 terdiri dari:

No	Uraian	Per 31 Desember 2011 (Rp)	Per 31 Desember 2010 (Rp)
1	SiLPA	(141.234.426,00)	6.862.190.786,00
2	Pendapatan yang Ditangguhkan	1.883.852,00	-
3	Cadangan Piutang	4.410.733.980,00	6.835.883.729,00
4	Cadangan Persediaan	1.415.581.615,00	2.029.036.300,00
5	DYHD Utang Jangka Pendek	(19.935.881.507,00)	
	Jumlah	(14.248.916.486,00)	15.727.110.815,00

5.1.6.2 Ekuitas Dana Investasi

Saldo Ekuitas Dana Investasi per 31 Desember 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp1.568.537.587.122,10 dan Rp952.333.946.412,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Per 31 Desember 2011 (Rp)	Per 31 Desember 2010 (Rp)
1	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	15.418.944.463,10	10.738.272.265,43
2	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	1.528.285.969.696,00	941.595.674.146,57
3	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	24.832.672.963,00	-
	Jumlah	1.568.537.587.122,10	952.333.946.412,00

5.1.7 Komponen-Komponen Laporan Arus Kas

Fungsi Laporan Arus Kas adalah menyajikan informasi mengenai Saldo Awal Kas, Penerimaan Kas, Pengeluaran Kas dan Saldo Akhir Kas selama satu Tahun Anggaran. Laporan Arus Kas disajikan dengan pendekatan atas Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pembiayaan, dan Aktivitas Non Anggaran sampai dengan 31 Desember 2011.

Arus kas Pemerintah Kota Ternate selama Tahun 2011 mengalami penurunan bersih sebesar Rp(2.374.120.064,11), jumlah ini diperoleh dari selisih lebih arus kas dari aktivitas operasi sebesar Rp89.294.093.550,89, selisih kurang arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan sebesar Rp94.165.997.035,00, selisih kurang arus kas dari aktivitas pembiayaan sebesar Rp2.097.000.000,00 dan selisih lebih Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran sebesar Rp4.594.783.420,00. Saldo Kas Daerah per 31 Desember 2011 sebesar Rp3.893.299.280,89. Di samping itu terdapat saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp803.072.742,00, sehingga jumlah keseluruhan Kas adalah sebesar Rp4.685.492.416,89

Berikut disajikan secara rinci Laporan Arus Kas sampai dengan 31 Desember 2011.

5.1.7.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Berdasarkan data Arus Kas per 31 Desember 2011, Pemerintah Kota Ternate jumlah arus kas masuk sebesar Rp527.081.539.018,89 dan jumlah arus kas keluar sebesar Rp437.787.445.468,00. Sehingga terdapat arus kas bersih dari aktivitas operasi per 31 Desember 2011 sebesar Rp89.294.093.550,89 dengan rincian sebagai berikut:

Arus Kas Masuk Aktivitas Operasi

No	Uraian	Per 31 Desember 2011	Per 31 Desember 2010
1	Hasil Pajak Daerah	15.477.846.926,00	8.187.014.548,00
2	Hasil Retribusi Daerah	10.977.469.958,00	9.847.526.379,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	263.772.207,00	304.761.759,00
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	4.599.022.727,00	3.103.690.738,00
5	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	50.800.952.114,00	56.407.422.819,00
6	Dana Alokasi Umum	313.861.356.000,00	281.284.868.000,00
7	Dana Alokasi Khusus	29.521.400.000,00	24.653.800.000,00
8	Dana Penyesuaian	85.416.616.880,00	43.866.312.800,00
9	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	14.102.546.659,00	10.862.834.343,00
10	Pendapatan Hibah	1.932.377.641,89	20.296.242.535,00
11	Pendapatan Lainnya	128.177.906,00	-
	Jumlah	527.081.539.018,89	458.814.473.921,00

Arus Kas Keluar Aktivitas Operasi

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Belanja Pegawai	324.603.284.220,00
2	Belanja Hibah	5.051.843.750,00
3	Belanja Bantuan Sosial	7.864.808.170,00
4	Belanja Tak Terduga	4.799.975.000,00
5	Belanja Barang dan Jasa	95.467.534.328,00
	Jumlah	437.787.445.468,00

5.1.7.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan

Berdasarkan data Arus Kas per 31 Desember 2011, Pemerintah Kota Ternate jumlah tidak ada arus kas masuk dari aktivitas investasi aset nonkeuangan. sedangkan arus kas keluar sebesar Rp94.165.997.035,00. Sehingga terdapat arus kas bersih dari aktivitas investasi aset nonkeuangan per 31 Desember 2011 sebesar Rp(94.165.997.035,00) dengan rincian sebagai berikut:

Arus Kas Keluar

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Tanah	6.567.358.000,00
2	Peralatan dan Mesin	15.223.790.809,00
3	Gedung dan Bangunan	21.096.159.765,00
4	Jalan, irigasi dan jaringan	50.425.461.261,00
5	Aset tetap lainnya	853.227.200,00
	Jumlah	94.165.997.035,00

5.1.7.3 Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan

Berdasarkan data Arus Kas per 31 Desember 2011, Pemerintah Kota Ternate jumlah tidak ada arus kas masuk dari aktivitas penerimaan pembiayaan. kecuali penerimaan SILPA tahun sebelumnya yang sudah diperhitungkan sebagai saldo awal sehingga tidak perlu dimasukkan kedalam arus kas masuk. sedangkan arus kas keluar sebesar Rp2.097.000.000,00. Sehingga terdapat arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan per 31 Desember 2011 sebesar Rp(2.097.000.000,00) seluruhnya merupakan penyertaan modal kepada BUMD.

5.1.7.4 Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran

Berdasarkan data Arus Kas per 31 Desember 2011, Pemerintah Kota Ternate jumlah arus kas masuk dari aktivitas non anggaran sebesar Rp49.054.952.450,00. arus kas masuk ini merupakan kas masuk dari pemotongan pajak dan potongan-potongan lainnya terkait belanja gaji maupun barang dan jasa baik di BUD maupun di SKPD. termasuk dalam arus masuk kas ini adalah penerimaan jasa giro di rekening bendahra pengeluaran SKPD yang belum disetorkan ke kas daerah. Arus kas keluar dari aktivitas non anggaran sebesar Rp44.460.169.030,00 merupakan setoran dari pemotongan pajak dan dan potongan-potongan lainnya terkait belanja gaji maupun barang dan jasa baik di BUD maupun di SKPD.

BAB VI

PENUTUP

Pemerintah Kota Ternate memiliki 42 SKPD yang berfungsi sebagai entitas akuntansi. Setiap entitas akuntansi diwajibkan untuk menyusun Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan konsolidasi dari 42 SKPD entitas akuntansi tersebut kemudian disampaikan kepada Walikota melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) untuk selanjutnya dikonsolidasikan menjadi sebuah Laporan Keuangan Pemerintah Kota Ternate.

Pemerintah Kota Ternate pada Tahun Anggaran 2011 juga telah menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI Tahun 2010 berupa perbaikan dalam pelaporan pendapatan, pelaporan nilai investasi, penatausahaan perhitungan PFK, dan beberapa rekomendasi lainnya.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Ternate Tahun 2011 diharapkan mampu memberikan informasi tentang kinerja pengelolaan keuangan daerah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta sebagai bahan pertimbangan untuk membuat keputusan manajemen, baik di bidang ekonomi, sosial maupun politik bagi Pemerintah Kota Ternate.

Demikian Laporan Keuangan Kota Ternate Tahun Anggaran 2011.